



---

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

---



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 08 Februari 2023

  
PEMERINTAH KABUPATEN  
RII - KEPADA RELAKSANA,  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
MASDIN, AP., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19730315 199311 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### VISI

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

### MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	NOTIFIKASI <span style="color: orange;">■</span> Tercapai <span style="color: teal;">■</span> Tidak Tercapai	CAPAIAN KINERJA
I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	➔	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) = 0,44
II. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	➔	1. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 112,11 %
a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	➔	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 92,16 %
b. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan	➔	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 100%
c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi	➔	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	➔	1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 106,5%

1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang	→	1. Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0,09%
2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak	→	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 2,118%
3. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana	→	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
4. Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	→	1. Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan = 100%
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat	→	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu = 100%
6. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	→	1. Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 93,33%
7. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	→	1. Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar = 100%
8. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	→	1. Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 166,67%
9. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	→	1. Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah = 100,4%
10. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	→	1. Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi = 66,66%
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	→	1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 111,91%
12. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	→	1. Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 113,6%

## DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<i>i</i>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<i>ii</i>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<i>iii</i>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<i>iv</i>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<i>v</i>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas dan Fungsi .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	2
1.4 Isu Strategis/Permasalahan .....	6
1.5 Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Target Kinerja tahun 2021-2026 .....	9
1. Visi dan Misi .....	10
2. Indikator Kinerja Sasaran .....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	18
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	118

## DAFTAR TABEL

*hal.*

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 .....	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 .....	13
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 .....	14
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja .....	15
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja .....	16
Tabel 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 1 .....	18
Tabel 7	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022 .....	24
Tabel 8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	27
Tabel 9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	28
Tabel 10	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	29
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026) .....	30
Tabel 12	Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	31
Tabel 13	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	31
Tabel 14	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	32
Tabel 15	Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	33
Tabel 16	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan .....	37
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan .....	40
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan .....	53
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung .....	63
Tabel 20	Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	66
Tabel 21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	66
Tabel 22	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	67
Tabel 23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026) .....	68
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung .....	69
Tabel 25	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....	101
Tabel 26	Permasalahan dan Solusi .....	105

## DAFTAR GAMBAR

	<i>hal.</i>
<b>Gambar 1</b> Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 .....	3

## DAFTAR GRAFIK

		<i>hal.</i>
<b>Grafik 1</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ...	2
<b>Grafik 2</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 .....	2
<b>Grafik 3</b>	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022.....	17
<b>Grafik 4</b>	Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2022.....	18
<b>Grafik 5</b>	Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022.....	23
<b>Grafik 6</b>	Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2022. ....	34
<b>Grafik 7</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	38
<b>Grafik 8</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	41
<b>Grafik 9</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	43
<b>Grafik 10</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	44
<b>Grafik 11</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	46
<b>Grafik 12</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	48
<b>Grafik 13</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	50
<b>Grafik 14</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	51
<b>Grafik 15</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	53
<b>Grafik 16</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & & IV TA. 2022 .....	55
<b>Grafik 17</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	57
<b>Grafik 18</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	58
<b>Grafik 19</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	60
<b>Grafik 20</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	61
<b>Grafik 21</b>	Data Kejadian Bencana Januari s.d Desember Tahun 2022.....	63

<b>Grafik 22</b>	Perbandingan Data Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d 2022.....	63
<b>Grafik 23</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	74
<b>Grafik 24</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	74
<b>Grafik 25</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	75
<b>Grafik 26</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	76
<b>Grafik 27</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV TA. 2022 .....	77
<b>Grafik 28</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	76
<b>Grafik 29</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	78
<b>Grafik 30</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	79
<b>Grafik 31</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	80
<b>Grafik 32</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	81
<b>Grafik 33</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	82
<b>Grafik 34</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	83
<b>Grafik 35</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	85
<b>Grafik 36</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	81
<b>Grafik 37</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	85
<b>Grafik 38</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	86
<b>Grafik 39</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	87
<b>Grafik 40</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	87
<b>Grafik 41</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	88
<b>Grafik 42</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	89
<b>Grafik 43</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	89
<b>Grafik 44</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	91
<b>Grafik 45</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	92
<b>Grafik 46</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	93
<b>Grafik 47</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	93

<b>Grafik 48</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	94
<b>Grafik 49</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022 .....	95
<b>Grafik 50</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022 .....	96
<b>Grafik 51</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, & IV TA. 2022.....	97
<b>Grafik 52</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	98
<b>Grafik 53</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022.....	99
<b>Grafik 54</b>	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	100

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1 TUGAS DAN FUNGSI

---

**B**adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas* : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
- Fungsi* : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI

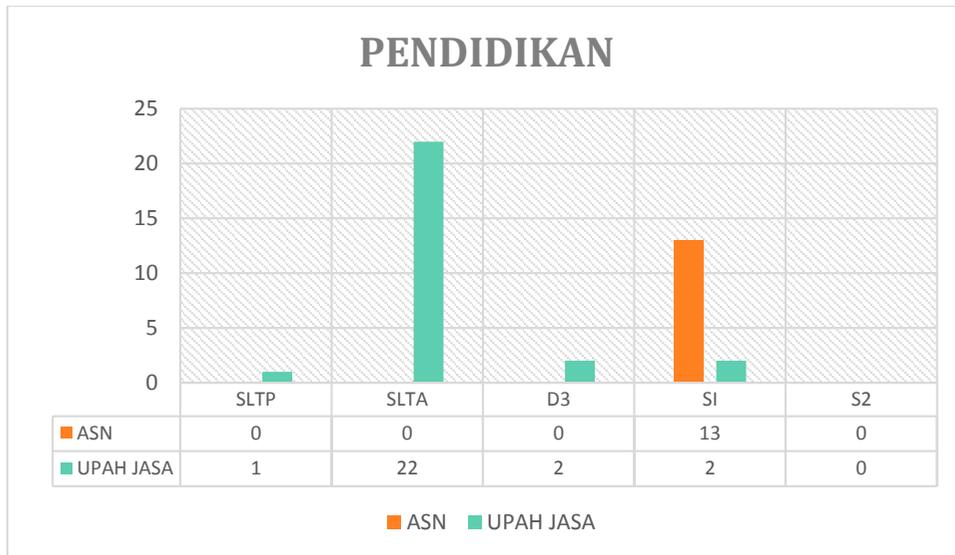
---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

### Sumber Daya Manusia (SDM)

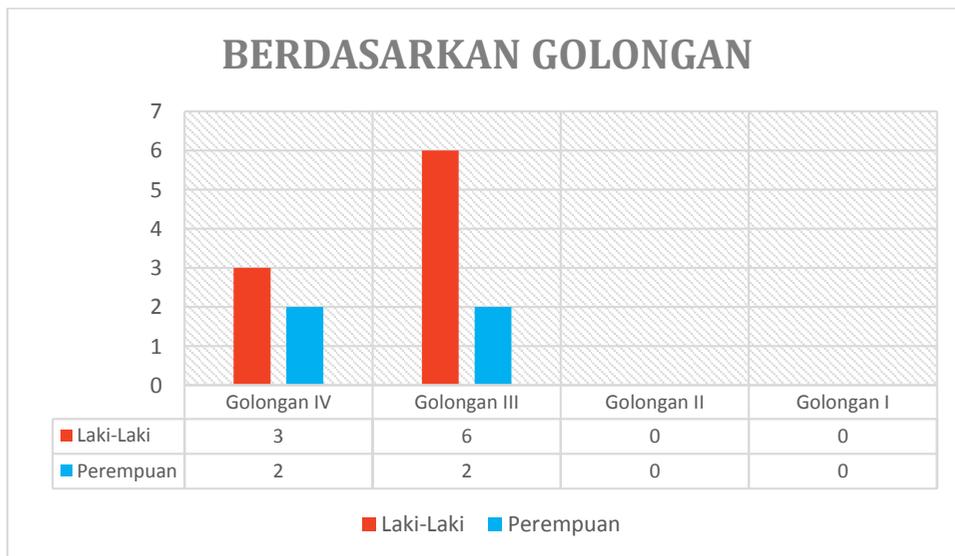
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 40 orang, terdiri dari Aparatur Sipil

Negara (ASN) 13 orang dan Tenaga Upah Jasa 27 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 24 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



**Grafik. 1**

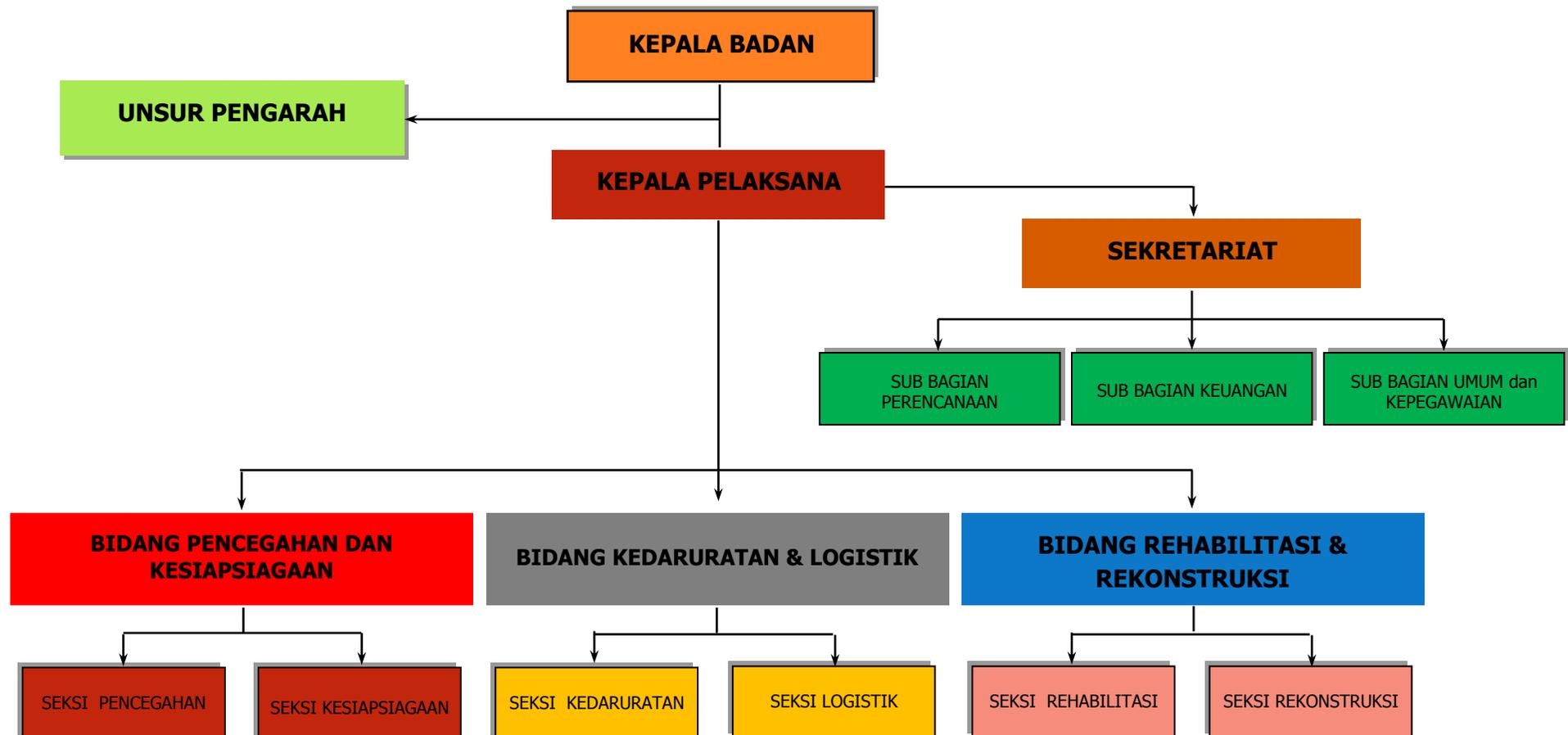
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022



**Grafik. 2**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

**Gambar 1**  
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2022



### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

---

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana

#### 1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)”**. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat isu-isu strategis antara lain :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
2. Belum tersedianya perencanaan penanganan bencana (Rencana Kontijensi) terhadap ancaman bencana yang ada untuk semua jenis bencana
3. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
4. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana
5. Masih lemahnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana.
6. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
7. Belum adanya Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
8. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana.
9. Minimnya pengalokasian anggaran Belanja Tidak terduga khusus bencana
10. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana

11. Masih rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
12. Keterbatasan jumlah personil penanggulangan bencana yang memenuhi standar kualifikasi
13. Keterbatasan sarana-prasarana penanggulangan bencana.

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

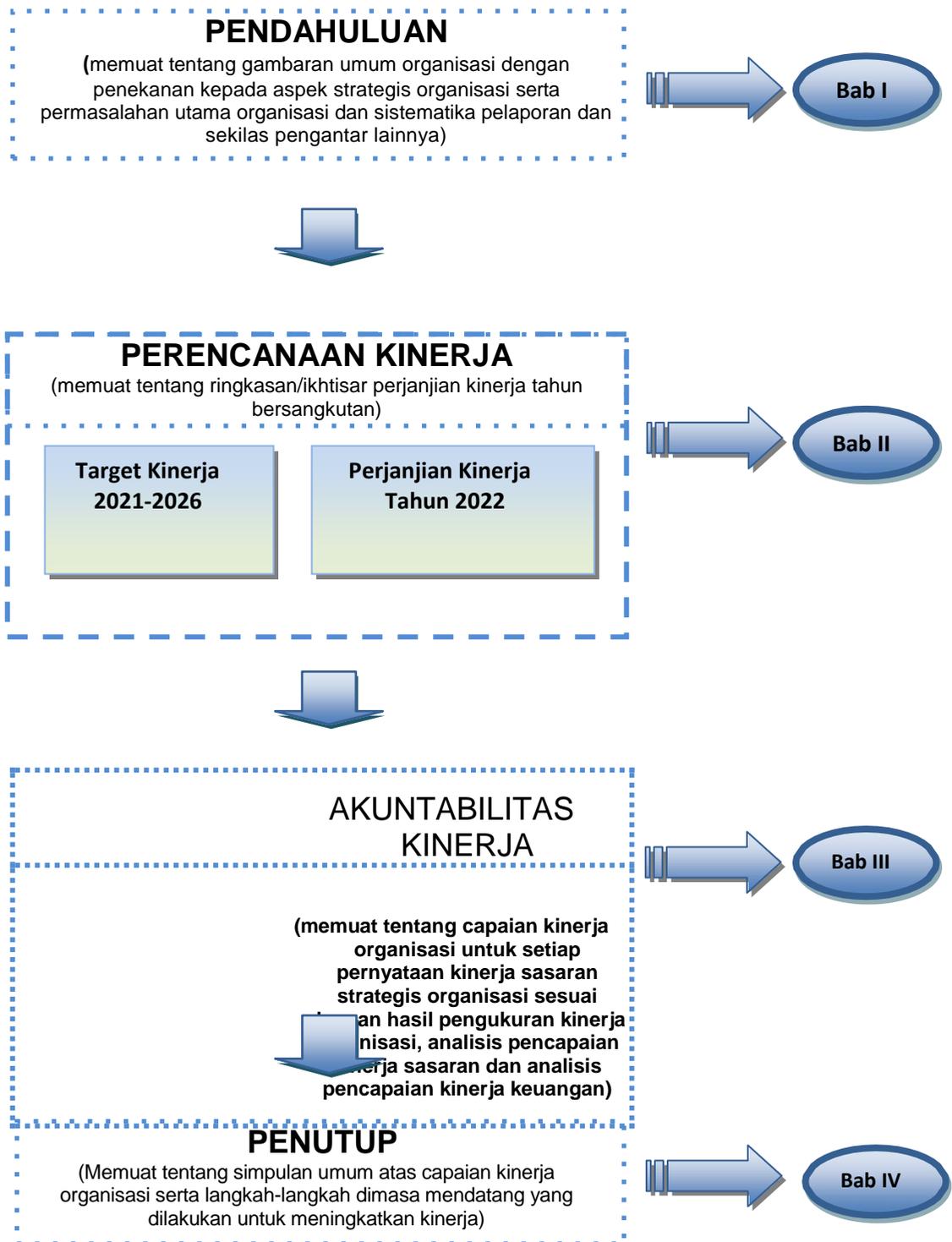
---

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab



## BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2021 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana, dan sasaran pendukung yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

#### A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

---

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

## 1. Pernyataan Visi

---

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

## 2. Pernyataan Misi

---

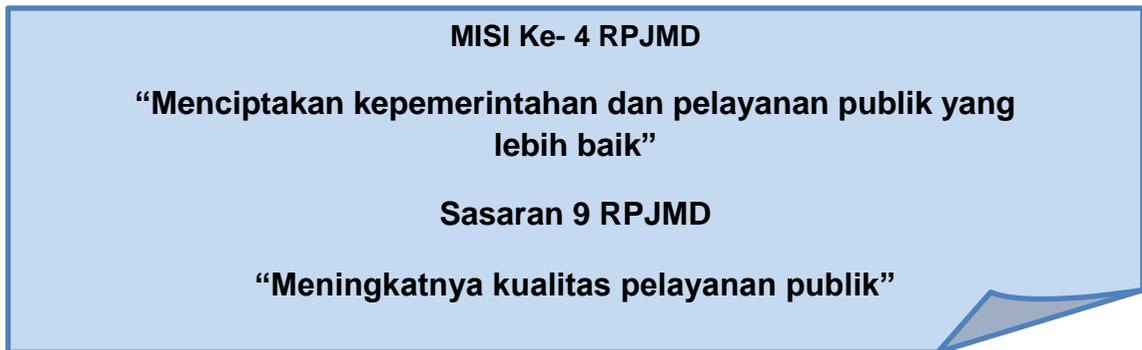
Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

**MISI Ke- 3 RPJMD**

**“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”**

**Sasaran 7 RPJMD**

**“Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”**



### 3. Indikator Kinerja Sasaran

---

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,50	0,50
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	95	95	95	97	98	100	100

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2022 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 yang telah dilakukan revisi atau perubahan karena adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,44 (sedang)
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 didukung dengan pembiayaan APBD-P Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 4.444.450.041,-** (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.831.719.521,-**, belanja barang dan jasa **Rp. 2.483.062.520,-** dan belanja modal **Rp 129.668.000,-**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.**  
**Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.831.939.669,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	1.612.510.342,-	APBD
JUMLAH		4.444.450.041,-	

## BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang

digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

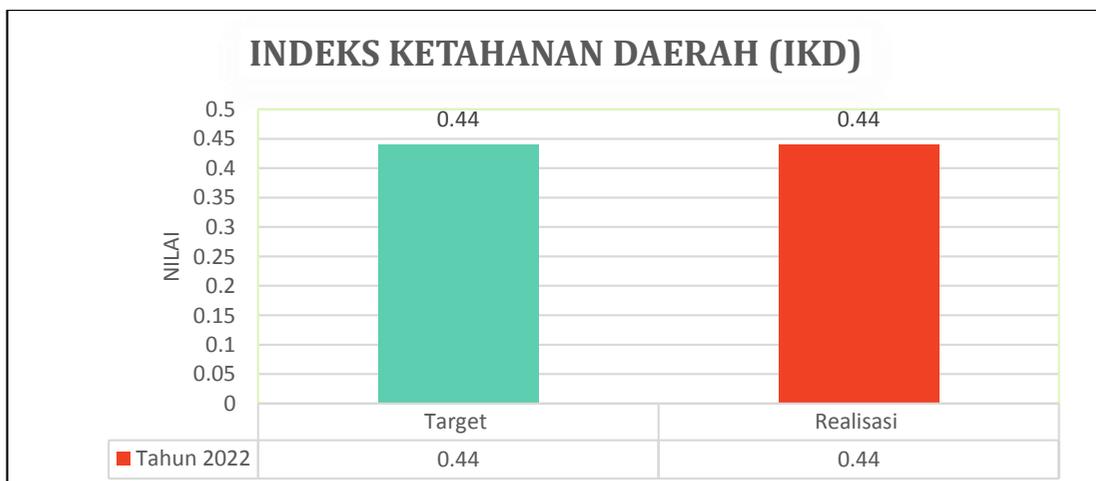
**Tabel. 5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,44 %	0,44 %	100	●
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	106,5%	112,11	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

### Sasaran Strategis I

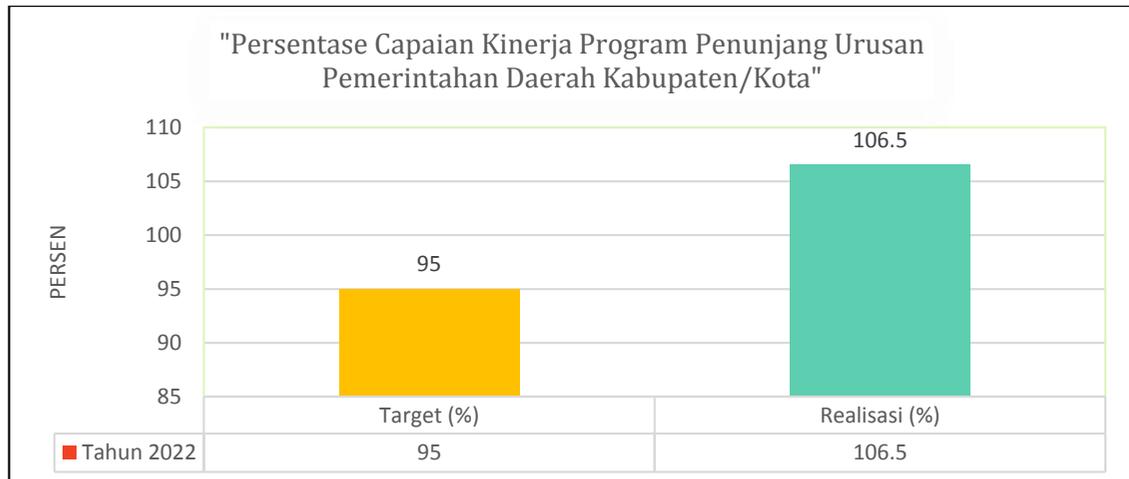
#### Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana



**Grafik. 3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022**

**Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)**

**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**



**Grafik. 4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2022**

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

## SASARAN STRATEGIS 1

### “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”

Tabel. 6  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.44	0.44	100%

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

##### Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2022 adalah 0,44 dan realisasi 0,44 dengan persentase capaian kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2022 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bappelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, DAMKAR, TNI/POLRI dsb.

Pengumpulan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme ‘pemutakhiran’

bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

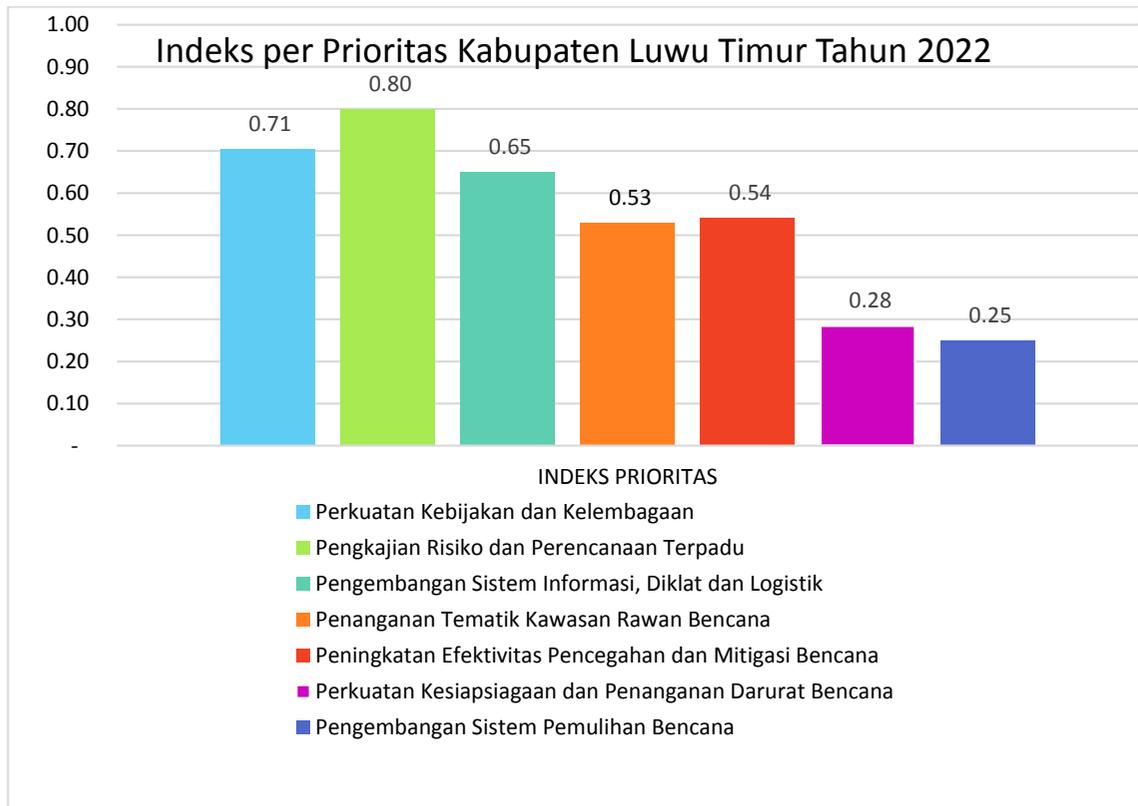
1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
  - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
  - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
  - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
  - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
  - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
  - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
  - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
  - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
  - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga

- Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
  - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
  - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
- PUSDALOPS BPBD
  - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
  - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
  - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
  - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
- Penataan Ruang berbasis PRB
  - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
  - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospital Inco Soroako)
  - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
  - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
  - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
- Rehabilitasi tanggul sungai
  - Normalisasi/Restorasi sungai
  - Pembangunan Bendung Sungai
  - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)

- Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
  - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
  - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
  - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
  - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
  - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
  - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
  - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
  - Penentuan Status Darurat Bencana
  - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
  - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
  - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
  - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
  - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
  - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Dan pada tahun 2022, Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur adalah 176,14 dari target 2022.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”**. IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana

**Grafik. 5**

Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.71	0.44	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.65		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.53		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.54		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.28		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.25		

**Tabel. 7**

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu :

- Program Penanggulangan Bencana :
  1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum maksimalnya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Keterlambatan pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline

### ❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2022, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana yaitu : Kidsware 5 paket, Paket Kebersihan leluarga 9 paket, Selimut 20 Lbr, Matras 20 Lbr, Perlengkapan Sekolah 15 paket, Ember 36 buah, Jerigen Lipat 30 buah, Masker Kain 3000 Pcs, Handsaniter isi 4 ltr sebanyak 8 Jerigen, Sabun Cair 24 Btl, APD 30 Pcs, Vitamin 300 tablet, Beras (49 karung), Mie Instant (50 dos), Air Mineral (45 dos), Logistik Pangan (27 paket), Perlengkapan Keluarga (35 paket), Perlengkapan Bayi (35 paket) dan Shelter Kit (15 paket).
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pencapaian target program prioritas Kepala Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, realisasi dapat diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dilaksanakan oleh 115 desa di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Sosialisasi rawan bencana, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, Kajian Risiko Bencana Desa dsb. Capaian kinerja tersebut juga berdampak kepada Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
- Dalam pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja melebihi dari target yang direncanakan, dari target 250 org dan terealisasi 262 org serta pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan sehingga dalam pelaksanaan gladi dapat melibatkan banyak orang, dan hal ini berimplikasi terhadap capaian SPM urusan bencana.

### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan,

maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu PUSDALOPS BPBD.

- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 24 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Dan pada tahun 2022, telah dilakukan pengajuan Proposal Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui e-proposal, dan sampai dengan bulan Desember 2022 telah rampung dan menunggu verifikasi oleh BNPB.

## ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 7  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,44	100%	1.612.510.342	1.342.102.151	83,23%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	92,16%	92,16%	72.518.925,-	71.572.000,-	98,69%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	631.718.507,-	507.998.624,-	80,41%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	908.272.910,-	762.531.527	83,95%

Tabel. 8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	83,23%	16,77%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 83,23%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 16,77%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya Data Base berdasarkan hasil penilaian Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2018 yang dimutakhirkan setiap tahun.
- telah dilakukan penginputan data IKD Kabupaten Luwu Timur pada bulan Nopember 2022 oleh BPBD Propinsi Sul-Sel.
- terdapat beberapa Rekomendasi pada penilaian IKD sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, Renkon Gempa Bumi, Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026.
- Adanya supporting data dari OPD terkait.
- Pelaksanaan FGD terkait Penilaian IKD Kabupaten Luwu Timur

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

**Tabel. 9**  
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana									Target Tahun 2026
	Tahun 2018			Tahun 2021			Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<b>Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</b>	0,42	0,42	100 %	0,43	0,43	100 %	0,44	0,44	100 %	0.50 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan target setiap tahun. Target yang ditetapkan untuk tahun 2022 lebih tinggi dari target tahun 2021 dan terealisasi 100%. Ini berarti bahwa telah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Target yang meningkat dengan capaiannya 100% karena dari 71 indikator yang menjadi penilaian dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa indikator yang terpenuhi misalnya Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa, Kajian Risiko Bencana telah terintegrasi dalam penyusunan RTRW dan RDTR beberapa kecamatan, telah dilakukan Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, terbentuknya beberapa Desa Tangguh Bencana, adanya Satuan Pendidikan Aman Bencana dsb.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 10**  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
	Realisasi				
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,43	0,44	0,44	0,50 (sedang)	87%

#### 4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 11

Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

Tabel. 12  
Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target (%)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	92,16%	72,518,925,-	71.572.000,-	98,69%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	551,756,790,-	441,140,000,-	79,95%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	908,272,910,-	762,531,527,-	89,95%

Tabel. 13  
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		<b>1.532.548.625,-</b>	
1	<b>Pelayanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	-	<b>72.518.925,-</b>	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	72.518.925,-	-
2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	-	<b>551.756.790,-</b>	-

	Bencana				
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	76.939.270,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	58.000.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	128,622,720,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	-	64.014.850,-	-
		Penyusunan Rencana Kontijensi	-	191.799.980,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	32.379.970,-	-
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	-	<b>908.272.910,-</b>	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	665.091.800,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	69.477.500,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	85.422.750,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	29.254.820,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	-	59.026.040,-	-

**Tabel. 14**  
**Kendala, Permasalahan dan Solusi**  
**SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, (2). Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 2 Kecamatan dalam kondisi rusak berat.(3). <b>Sub Kegiatan Sosialisasi</b> , komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana telah dilaksanakan pada triwulan II TA. 2022, namun dari target 300 org yang terealisasi hanya 262 org	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

## 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

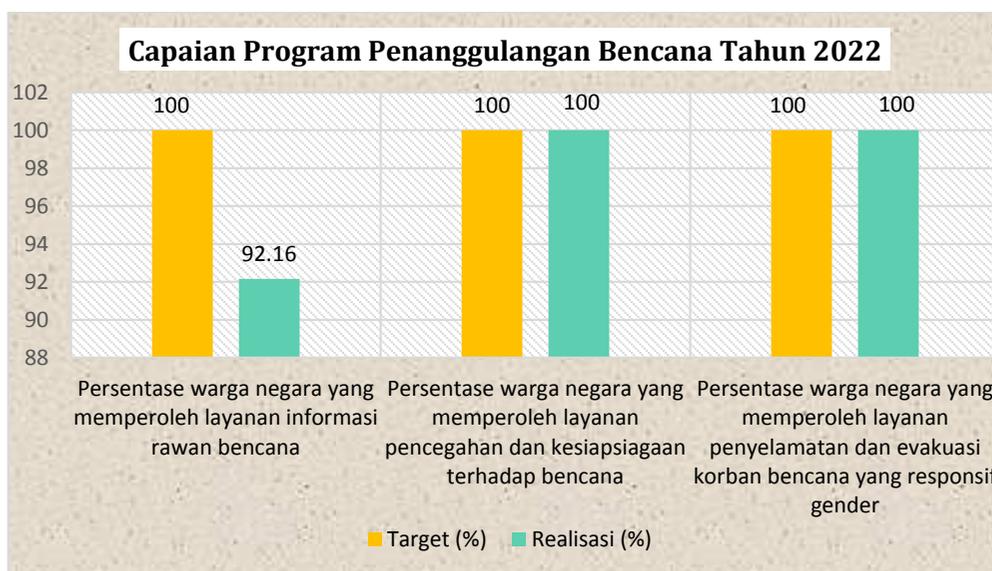
### ❖ Program Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tujuan program penanggulangan bencana** yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Sasaran program adalah :** (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

✚ Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)



**Grafik. 6**  
Capaian Kinerja Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2022 adalah :

- Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)**

**Formulasi** : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 92,16% dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,16%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 262 org, PUSDALOPS BPBD 6.002 org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili 26.578 org, Workshop Mitigasi Bencana sebanyak 124 org dan pelaksanaan mitigasi bencana Desa Nuha dan Matano (2.525 org), dan melaksanakan mitigasi bencana (sosialisasi) di 17 desa di kec. Towuti (41.135 org) dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 278.347 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat.

**2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

**Formulasi** : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

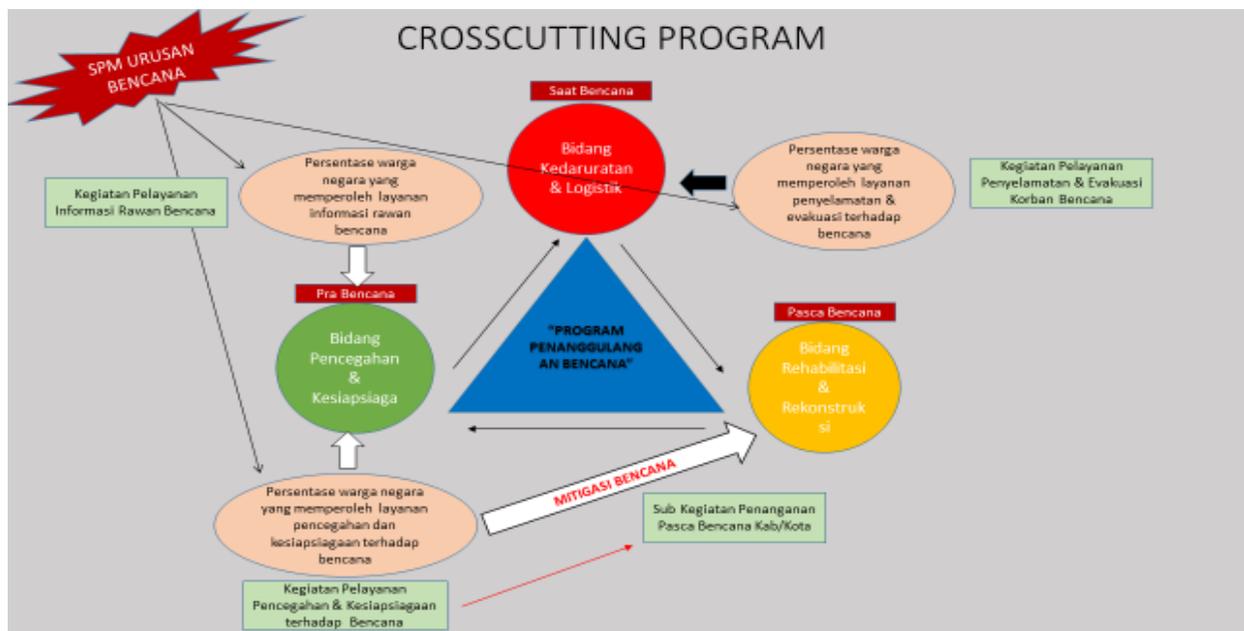
Target kinerja tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%, capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 40 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 90 org, Sekolah Lapang Gempa Bumi sebanyak 50 org dan BMKG Goes To School sebanyak 300 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 262 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa bumi yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah

302.039 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

**3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)**

**Formulasi :** “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

Target kinerja Tahun 2022 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 laki-laki dan 294 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 315 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.



Pada tahun 2022, Program Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 kegiatan Utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana yaitu :

## 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

**Tabel. 15**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,09%	0,09 %	100%
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	262 org	262 org	100%

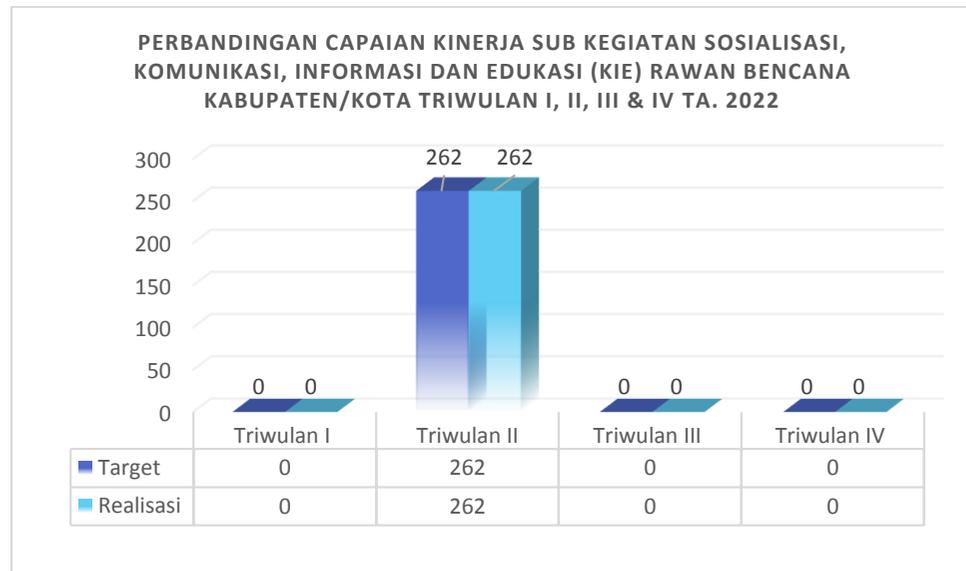
**Pelayanan informasi rawan bencana adalah** pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

**Indikator kegiatan** adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan **Formulasi** : *Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus*. Target Tahun 2022 adalah 0,09% (262 org) dan realisasi 0,09% (262 org) dengan persentase capaian kinerja 100%.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik 7**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 262 orang dan realisasi 262 orang, persentase capaian 100%. Capaian kinerja mencapai 100% karena dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran, disesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir, begitu juga dengan anggarannya. Sub kegiatan dilaksanakan di 3 zona dan peserta berasal dari 11 kecamatan. Peserta terdiri dari Guru SD, SMP dan SMA dengan pertimbangan bahwa informasi kebencanaan yang diperoleh dapat diteruskan ke tingkat sekolah. Disediakan anggaran sebesar Rp. 72.518.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.572.000,- atau sebesar 98,69%.

### Dokumentasi



## 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

**Tabel. 16**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,117%	2.118%	100,05%
			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%	100%	100%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparaturnya dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	90 org	90%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	47 unit	47 unit	100%

	Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	terhadap bencana				
c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4 Desa	4 Desa	100%
d.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
		Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
e.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	40 org	40 org	100%
f.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya data/informai tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dok	1 Dok	100%
g.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 org	262 org	104,8%

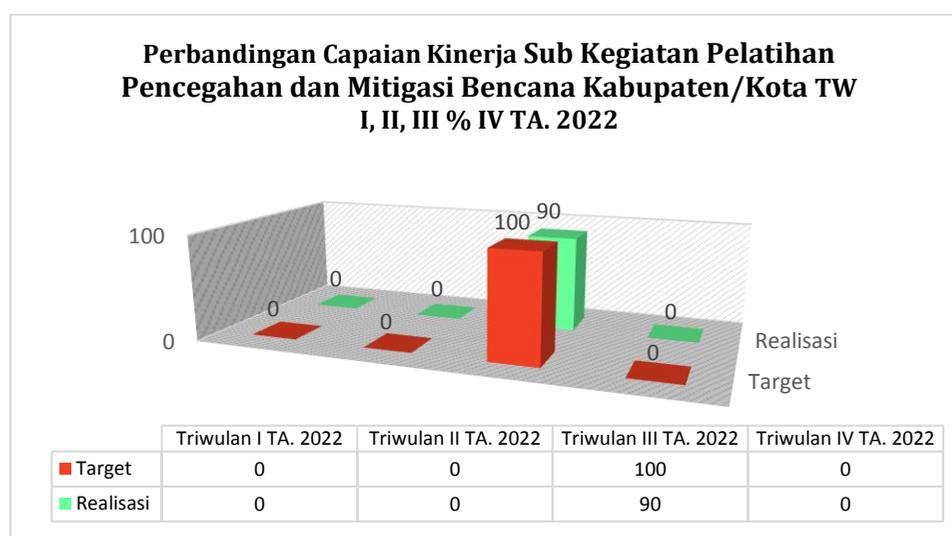
***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah*** serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

***Indikator kegiatan adalah*** (1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase

dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun. Adapun formulasinya adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus. Target dari indikator 1 adalah 2,117% (6.397 org) dan realisasi 2,118% (6.399 org) dengan persentase capaian kinerja 100,05%. Sedangkan target indikator 2 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik 8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

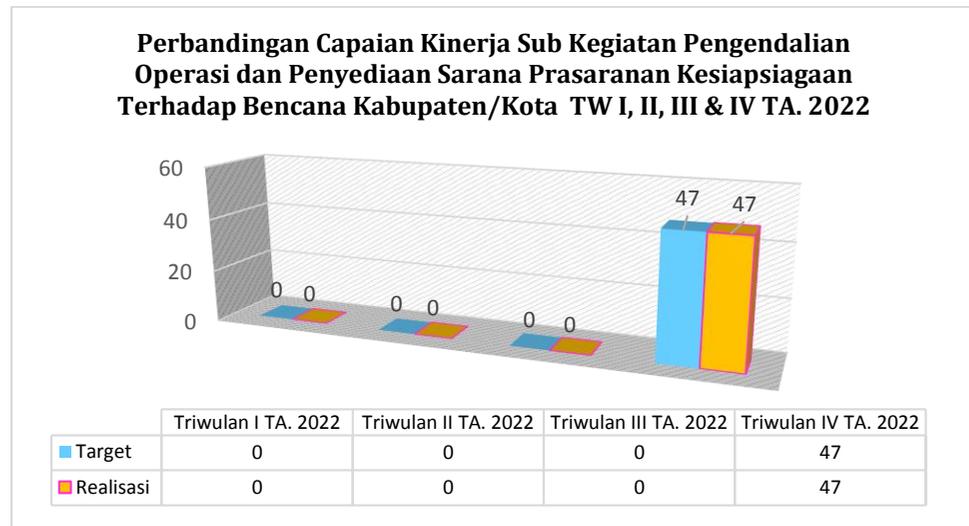
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 100 orang dan realisasi 90 orang dengan persentase capaian kinerja 90%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena beberapa peserta tidak sempat hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan di akhir tahun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 dan dihadiri oleh Kepala Sekolah tingkat SD dan SLTP dari 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 76.939.270,- dan realisasi keuangan Rp. 69.001.000,- atau sebesar 81,60 %. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 7.938.270,- karena jumlah peserta yang hadir tidak sesuai target, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan

beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan.

### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**



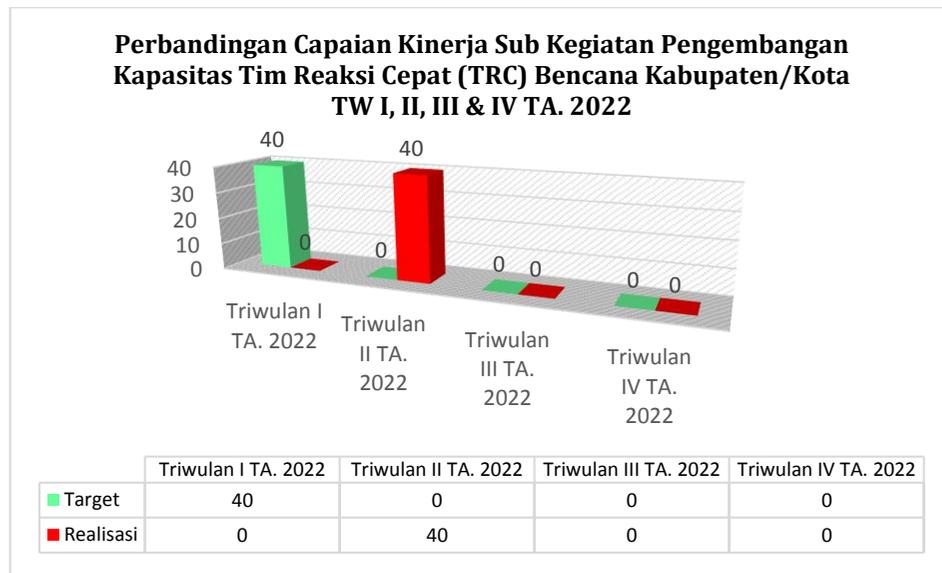
**Grafik 9**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 47 unit realisasi 47 unit, persentase capaian kinerja 100%. Adapun sarana dan prasarana yang diadakan yaitu pengadaan Life Jacket (pelampung) 45 unit dan Chainsaw 2 unit. Pengadaan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV TA. 2022 karena adanya perubahan target yang semula untuk pengadaan kantung jenazah, namun karena ketersediaannya masih mencukupi sedangkan yang mendesak dan sangat dibutuhkan adalah chainsaw dan life jacket untuk penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 58.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 52.836.000,- atau sebesar 91,10% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.164.000,- yang merupakan sisa belanja (sisa SPK).

Dokumentasi



- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota



Grafik 10

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

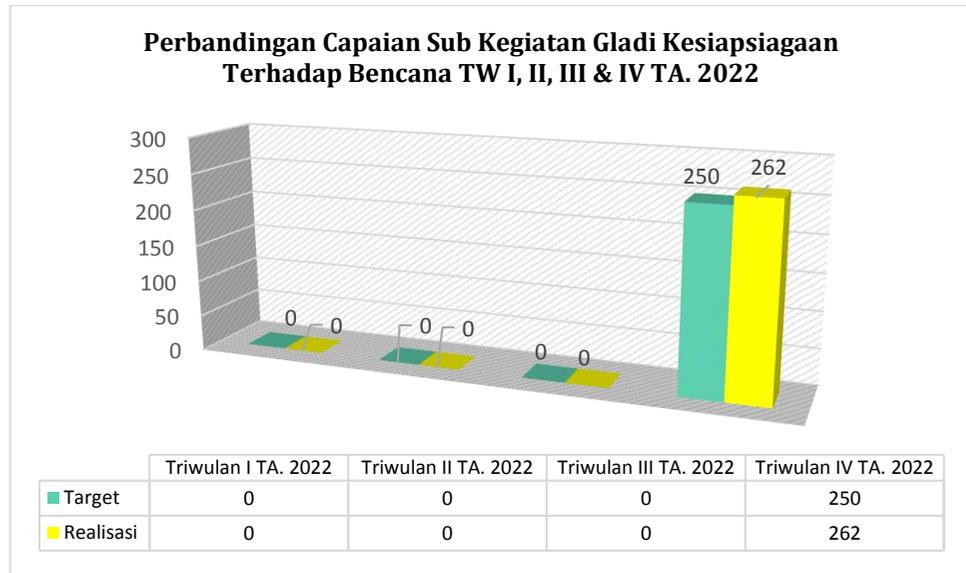
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target 40 orang dan realisasi 40 orang dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja mencapai 100% karena dilakukan

perubahan target kinerja dan keuangan pada saat perubahan anggaran. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Teknik Penyelamatan di Hutan (Jungle Rescue) dengan instruktur dari BASARNAS (Koord. Pos SAR Unit Siaga Luwu Timur). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan I, namun baru terlaksana pada Triwulan II karena terkendala keterlambatan pengadaan perlengkapan untuk pelatihan. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 64.014.850 dan realisasi keuangan Rp. 59.223.000,- (92,51%). Terdapat sisa anggaran sewa penginapan/hotel dan perjalanan dinas, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

### *Dokumentasi*



- **Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**



**Grafik 11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 orang dan realisasi 262 orang dengan persentase capaian kinerja 104,80%. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan IV TA. 2022. Capaian kinerja melebihi target karena pelaksanaan kegiatan dirangkaikan dengan gelar pasukan yang diadakan oleh TNI/POLRI secara serentak. Realisasi Sub kegiatan ini terdiri dari Apel Siaga Bencana dengan jumlah peserta 262 org dan Simulasi yang dilaksanakan di SDN 226 Patande. Peserta gladi/apel siaga bencana yaitu TNI/POLRI, Satpol, Damkar, PT. Vale Indonesia Tbk (Fire), Senkom, Tagana, Bela Negara, PMI, SAR, Basarnas, Dishub, Manggala Agni, TRC BPBD, Dinkes. Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2022 kegiatan dilaksanakan pada Triwulan IV sebesar Rp. 32.379.970,- dan realisasi keuangan Rp. 32.233.200,- atau sebesar 99,55%. Kegiatan tersebut juga bisa terlaksana dengan sukses berkat adanya dukungan dari dunia usaha yaitu PT. Vale Indonesia Tbk.

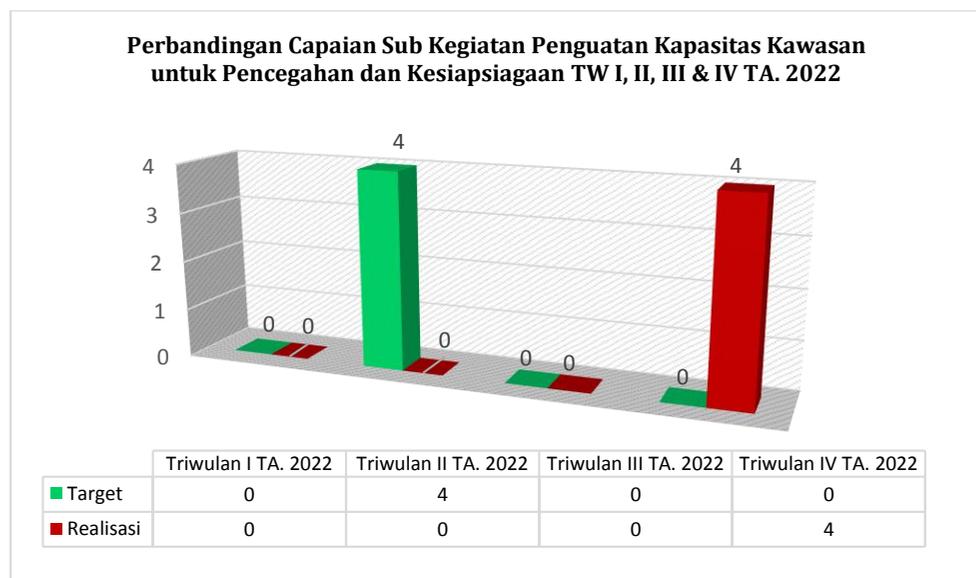
Dokumentasi Apel Siaga bencana



Dokumentasi Simulasi Gempa



- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan



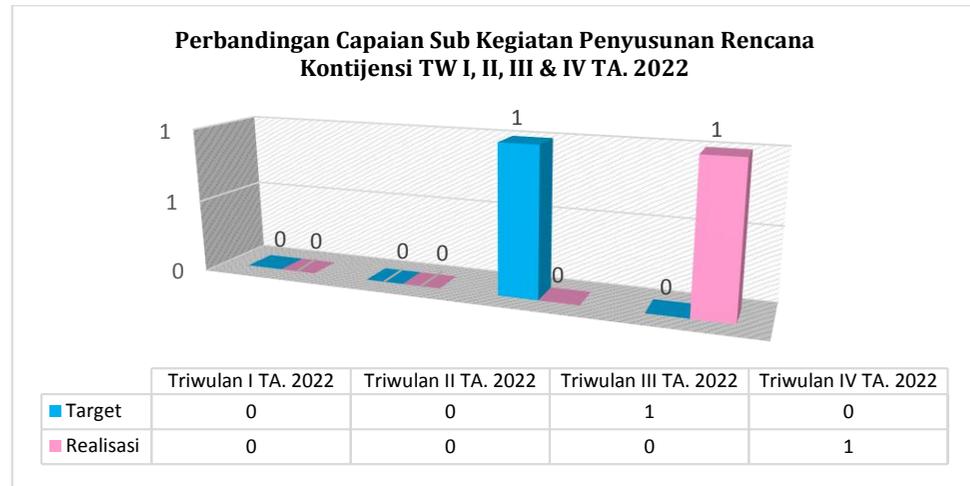
Grafik 12  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dengan target 4 Desa dan realisasi 4 Desa dengan persentase capaian kinerja 100%. Berdasarkan rencana aksi, output sub kegiatan ditargetkan pada Triwulan II TA. 2022. Namun baru terealisasi pada triwulan IV. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal narasumber. Adapun Destana yang dibentuk yaitu Desa Batu Putih Kec. Bauru, Desa Ujung Baru Kec. Tomoni, Desa Maliwowo Kec. Angkona dan Desa Ussu Kec. Malili. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 128.622.720,- dan realisasi keuangan Rp. 91.815.650,- atau sebesar 71,38 %. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena terdapat tahapan pada kegiatan Penilaian IKD yaitu Tahapan sosialisasi tidak dilakukan karena terkendala ketersediaan waktu narasumber, sehingga pelaksanaannya langsung pada penilaian IKD sehingga mempengaruhi realisasi keuangan. Dalam sub kegiatan ini terdapat 2 uraian kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembentukan DESTANA dan Penilaian IKD.

#### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi**



**Grafik 13**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 202**

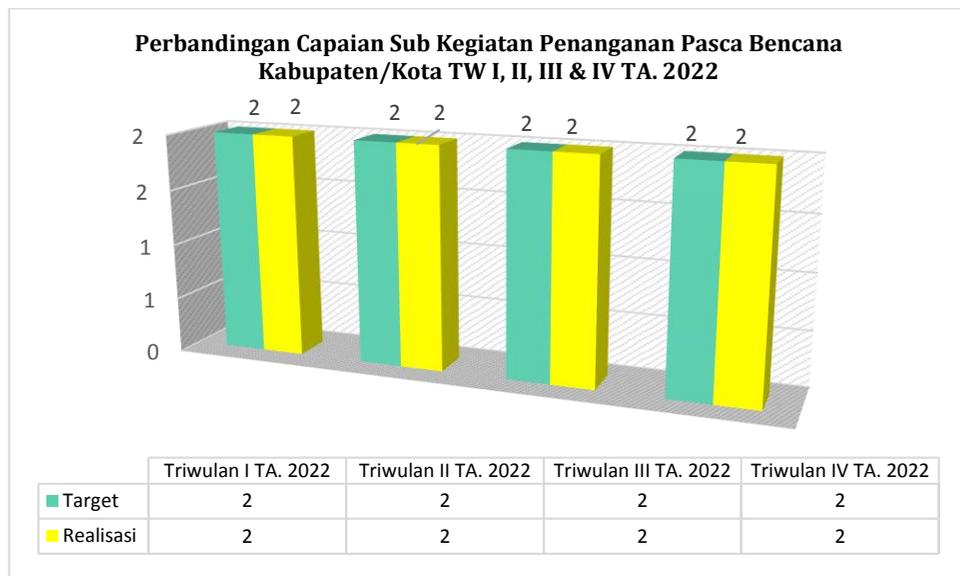
**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Berdasarkan rencana aksi, output sub kegiatan ditargetkan pada Triwulan III TA. 2022. Namun baru terealisasi pada triwulan IV. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal Tenaga Ahli/narasumber yang mempunyai pekerjaan di Kabupaten lain selain Kab. Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Renkon yaitu : Pertemuan tim persiapan penyusunan dokumen renkon, Lokakarya/Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Renkon, Pertemuan Tim Penyusunan Draft Awal Dokumen dan pemetaan, Identifikasi dan pengelolaan data, Lokakarya (FGD), Pengumpulan Data dan Penyusunan Draft Dokumen Renkon Skenario Kejadian, Sumber Daya dan Struktur Komando, Lokakarya Pemaparan Draft Dokumen & Peta Lokasi Evakuasi Renkon, Pertemuan Tim Revisi Dokumen dan Peta Pendukung, Revisi Akhir dan Finalisasi Dokumen Renkon, dan pelaksanaan Simulasi gempa bumi. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp. 191.799.980,- dan realisasi keuangan Rp. 136.031.150,- atau sebesar 70,92%. Realisasi kurang dari target karena pembayaran honor tenaga ahli untuk 5 org dan terealisasi hanya 4 org, sedangkan pada beberapa tahapan dalam penyusunan Renkon, narasumber yang hadir hanya 3 org, sehingga biaya transportasi dan sewa

hotel disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir, dan hal ini mempengaruhi realisasi keuangan.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik 14**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

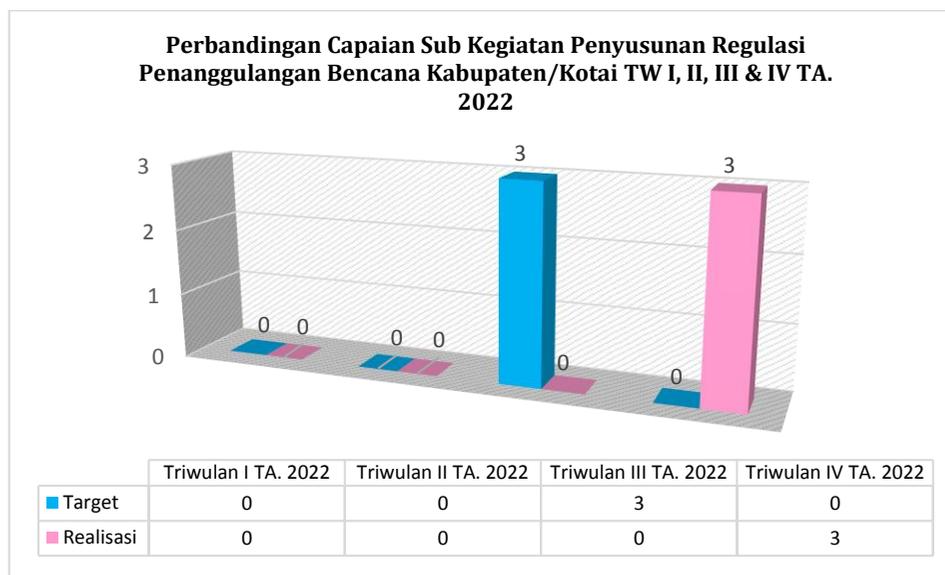
**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Dokumen tersebut berisi rekomendasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, dan akan diteruskan ke OPD terkait yang menangani ataupun dapat diusulkan ke BNPB (Dana Hibah RR) melalui proposal. Selain penanganan pasca bencana, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Pada tahun 2022, telah dilakukan rekonstruksi sektor permukiman terhadap korban kebakaran terdampak bencana sebanyak 18 Rumah dan Telah dilakukan rehabilitasi sektor permukiman terhadap korban terdampak bencana cuaca ekstrim sebanyak 43 Rumah. Telah diajukan Proposal bantuan dana hibah pascabencana Tahun 2022 telah rampung dan menunggu verifikasi oleh BNPB. Disediakan anggaran sebesar Rp 59.971.628,- yang terdiri dari belanja ATK Rp. 2.266.628, Belanja Perjalanan Dinas Rp. 55.160.000,- dan Belanja makan minum rapat Rp 1.645.000,- dan belanja penggandaan Rp. 900.000,- Realisasi 99,43% terdiri dari Belanja ATK Rp. 2.260.000,- , Belanja Perjalanan Dinas Rp. 54.847.724,-, Belanja penggandaan sebesar Rp. 899.700,-, dan makan minum tidak terealisasi karena anggaran ini sifatnya disiapkan untuk kegiatan rapat koordinasi pascabencana dengan OPD terkait.

### 3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel. 17  
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	100 %	100%
a.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi penanggulanga bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dok	3 Dok	100%

- **Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik 15**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Adapun target yang direncanakan adalah penyusunan Perbup dan SOP, yang terealisasi hanya SOP. Hal ini disebabkan karena Direncanakan penyusunan SOP dan Perbup untuk dokumen Renkon. Namun yang terealisasi hanya SOP, sedangkan Perbup Renkon tertunda pelaksanaannya karena dokumen yang direncanakan untuk dilakukan penyusunan Perbup, baru rampung diakhir tahun. Disediakan anggaran kas pada Triwulan IV sebesar Rp. 19.990.089,- dan realisasi sebesar Rp 8.851.200,- atau 44,28%.

#### 4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 18  
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100 %	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%

**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

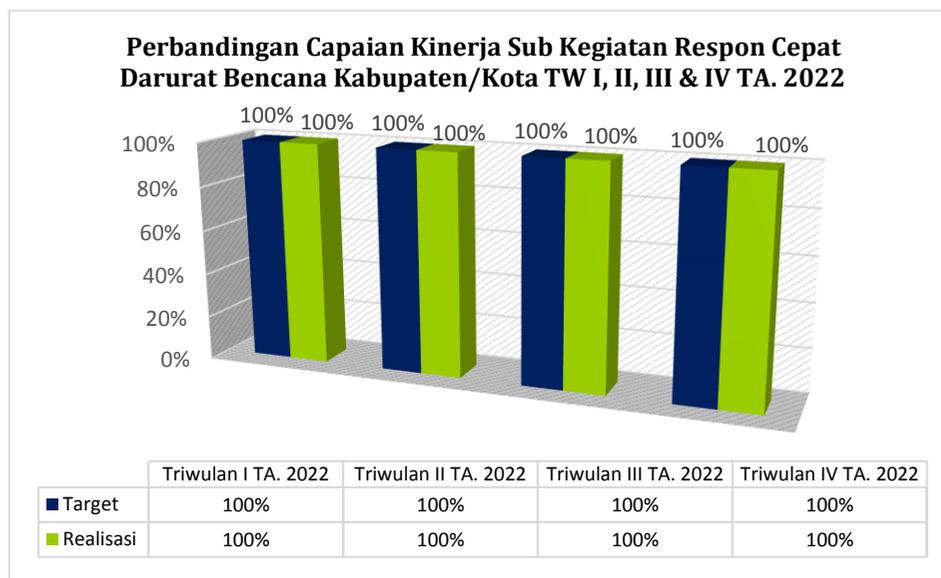
Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau dikhawatirkan akan hilang akibat bencana, (2) Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana, (3) Menindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

**Indikator kegiatan adalah** Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender dengan

**Formulasi** : Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah perkiraan korban bencana dikali seratus dengan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada bulan Januari s.d Desember tahun 2022, terdapat 607 jiwa korban terdampak (313 laki-laki dan 294 perempuan), dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 315 kejadian terdapat 6 kejadian orang hilang/tenggelam yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 246 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Cuaca ekstrim (angin kencang) 21 kejadian, Longsor 6 kejadian dan Kebakaran rumah 12 kejadian, difasilitasi dengan penyaluran bantuan logistik dan memperoleh Dana BTT untuk korban bencana. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik. 16**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

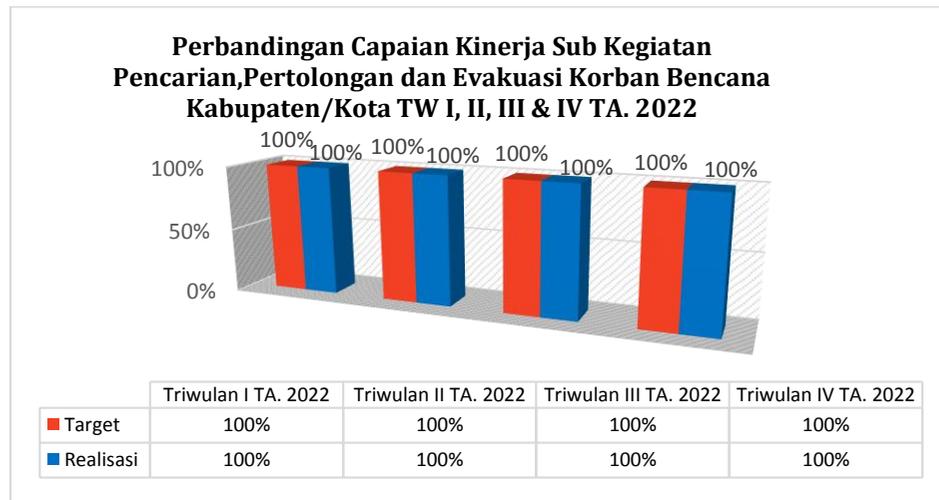
**Indikator sub kegiatan adalah** : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% dan

realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2022 yaitu 315 kejadian yaitu Banjir 6 kejadian, orang hilang/tenggelam 6 kejadian, kebakaran rumah 12 kejadian, kebakaran lahan 18 kejadian, cuaca ekstrim 21 kejadian, longsor 6 kejadian dan gempa bumi 246 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD. Disediakan anggaran sampai triwulan IV sebesar Rp 665.091.800- Terealisasi sebesar Rp. 615.551.400,- atau sebesar 92.55%. Anggaran sub kegiatan Tidak terealisasi 100 % disebabkan jumlah personel TRC hingga saat ini berjumlah 24 orang dari estimasi anggaran yang disediakan untuk 25 orang. Hal tersebut mempengaruhi realisasi anggaran khususnya Belanja Makan minum aktivitas lapangan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Gaji upah Jasa TRC).

#### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik 17**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

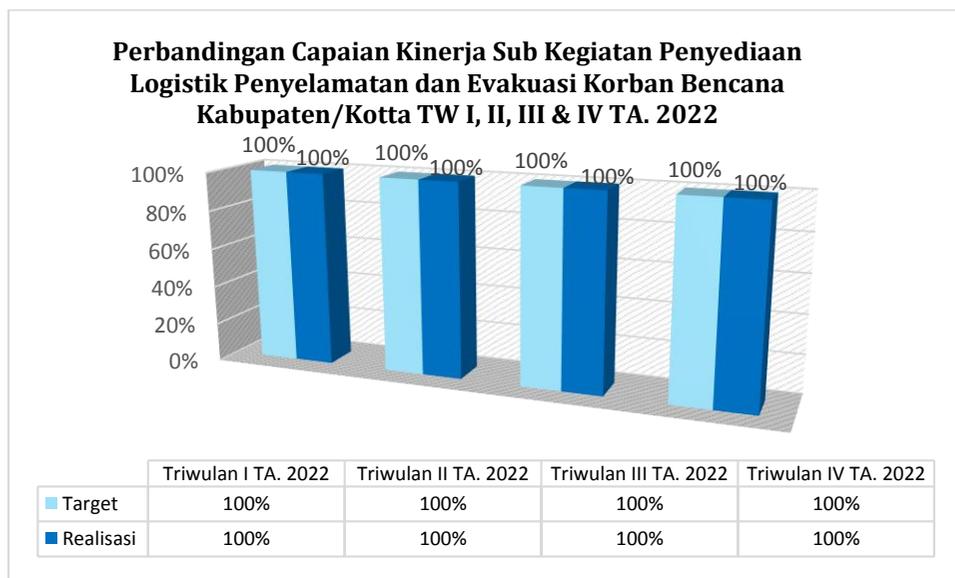
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 69.477.500,- dengan realiasi Rp. 62.161.700,- atau sebesar 89,47%. Terdapat sisa anggaran cukup besar pada Belanja Perjalanan Dinas yaitu Rp. 4.104.450,-. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim diakhir tahun berdasarkan informasi kebencanaan yang ada dan penggunaannya disesuaikan dengan kejadian bencana.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**



**Grafik 18**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

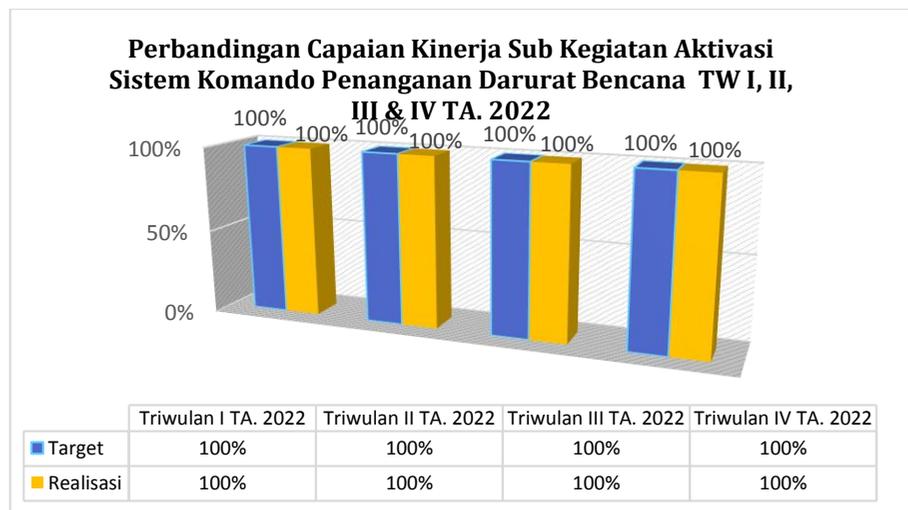
Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa, dari jumlah tersebut, sebanyak 599 jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya yaitu 8 org (korban org hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 85.422.750,- dengan realisasi Rp. 66.851.027,- atau 78,26 %. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena pada tahun 2022, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan, disamping itu terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang diantar langsung oleh Tim, sehingga terdapat efisiensi Belanja Bahan Pangan sebesar Rp.9.637.000,- dan Belanja Paket/Pengiriman Logistik sebesar Rp. 3.000.000,- serta Belanja Sewa Mobilitas Darat Rp 4.000.000,- . Jenis bantuan logistik yang diperoleh dari propinsi yaitu : Kidsware (5 paket), Paket Kebersihan Keluarga (9 paket), Selimut (20 lbr), Matras (20 lbr), Perlengkapan Sekolah (15 paket), Ember (36 buah), Jerigen Lipat (30 buah), Masker Kain (3000 pcs), Handsanitizer 4 ltr (8 jerigen), Sabun Cair (24 botol), APD (30 buah) dan Vitamin (300 tablet), Beras (49 karung), Mie Instanst (50 dos), air mineral (45 dos), Logistik Pangan (27 paket), Perlengkapan Keluarga (35 paket), Perlengkapan Bayi (35 paket), dan Shelter Kid (15 paket).

Dokumentasi Penyaluran Bantuan Logistik



- **Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana**

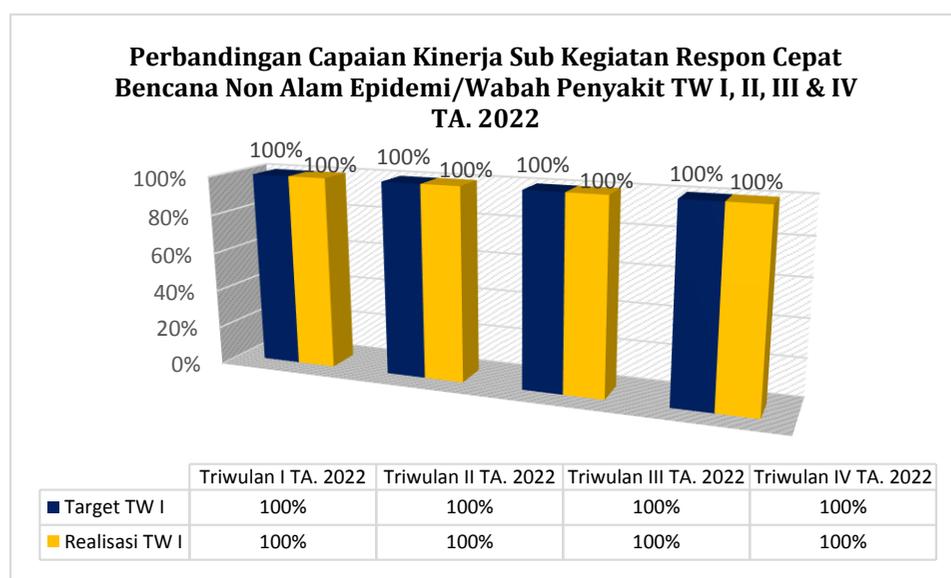


**Grafik 19**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa

koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan Januari s.d September 2022 sebanyak 40 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.254.820,- Namun realisasi keuangan hanya sebesar Rp. 700.000,-, hal ini disebabkan karena sampai akhir tahun 2022, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Namun anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian darurat bencana di akhir tahun.

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit**



**Grafik 20**  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (Covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah Covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 (meninggal) sebanyak 14 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp 59.026.040,- dengan realisasi Rp 17.267.400,- atau 38,79%. Realisasi keuangan yang rendah disebabkan

karena jumlah kejadian akibat Covid 19 mulai menurun dan bahkan pada bulan Mei s.d Desember 2022 tidak terdapat kejadian bencana akibat Covid 19. Namun demikian, anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian diakhir tahun.

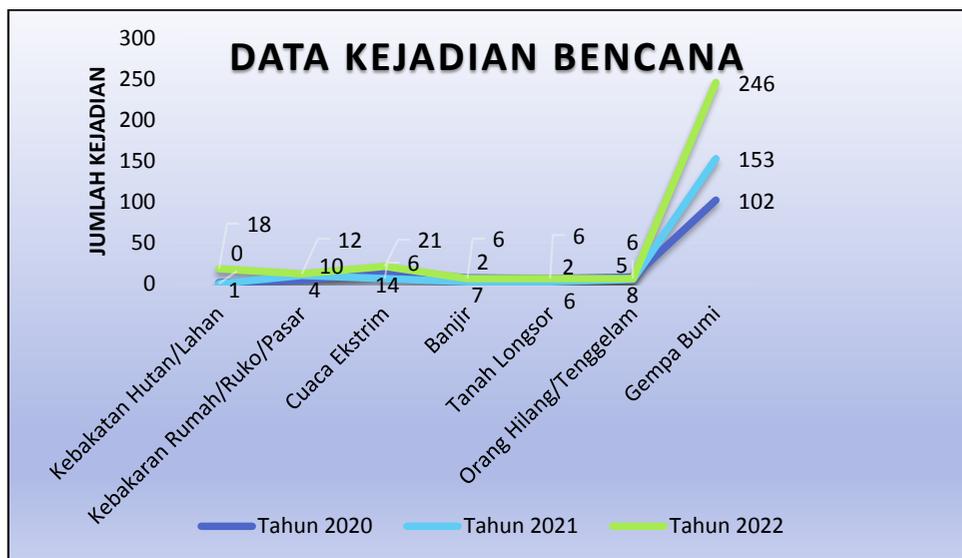
### *Dokumentasi Pemulasaran Jenazah Covid-19*





**Grafik. 21**

Data Kejadian Bencana Januari s.d Desember Tahun 2022



**Grafik. 22**

Perbandingan Data Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d 2022

## SASARAN 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**” tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 19  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	106,5%	112,11%	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

#### ❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Indikator kinerja sasaran penunjang** adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “**Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus**”.

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2022 adalah 95% dan realisasi 106,5% dengan persentase capaian kinerja 112,11%. Persentase capaian melebihi dari target karena terdapat kegiatan yang realisasinya lebih dari yang direncanakan sehingga menutupi kegiatan yang realisasinya < 100% yaitu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Hal inilah yang mempengaruhi realisasi kinerja secara keseluruhan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**❖ Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Terdapat jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana (pengurus barang) yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterlambatan proses administrasi keuangan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

**❖ Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- Percepatan proses administrasi keuangan
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

**❖ Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO
- Efisiensi anggaran belanja sandang pangan (logistik korban bencana) dan biaya paket pengiriman logistik

**❖ Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

#### ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 20**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisas	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	106,5%	112,11%	2.831.939.699,-	2.632.151.887,-	92.95%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	106,5%	112,11%	2.831.939.699,-	2.632.151.887,-	92.95%

**Tabel. 21**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	112,11%	92,95%	7,05%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 112,11% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,95%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 7,05%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 22**  
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah									Target Tahun 2026
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	101,87 %	101,87 %	95 %	102,94 %	108,36 %	95 %	106,5 %	112,11 %	100%

### ❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya melebihi dari target seperti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Terdapat harga satuan sesuai dengan SBM untuk 1 unit peralatan, tetapi dapat membiayai lebih dari beberapa unit peralatan misalnya pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
3. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, banyak diklat/pelatihan yang diikuti tetapi pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara
4. Beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan beberapa kegiatan lainnya tercapai sesuai target

Namun terdapat pula kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 yaitu

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena terkendala harga di e-catalog yang lebih tinggi dari harga toko sehingga metode pembeliannya dilakukan melalui mbizmarket.
- b. Terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tidak terealisasi karena terkendala jasa konsultan yang terbatas serta kurangnya minat karena pagu anggaran yang sangat minim. Disamping itu besaran jasa konsultan masih dibawah besaran remunerasi
- c. Beberapa sub kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik yang sifatnya disediakan, sehingga realisasinya disesuaikan dengan kejadian bencana
- d. Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi keuangan (SPJ).

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 23  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah  
(2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		

Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102,94%	106,5%	104,72%	100%	104,72%
--	---------	--------	---------	------	---------

## Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

**Tabel. 24**  
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	106,5%	112,11%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	100%

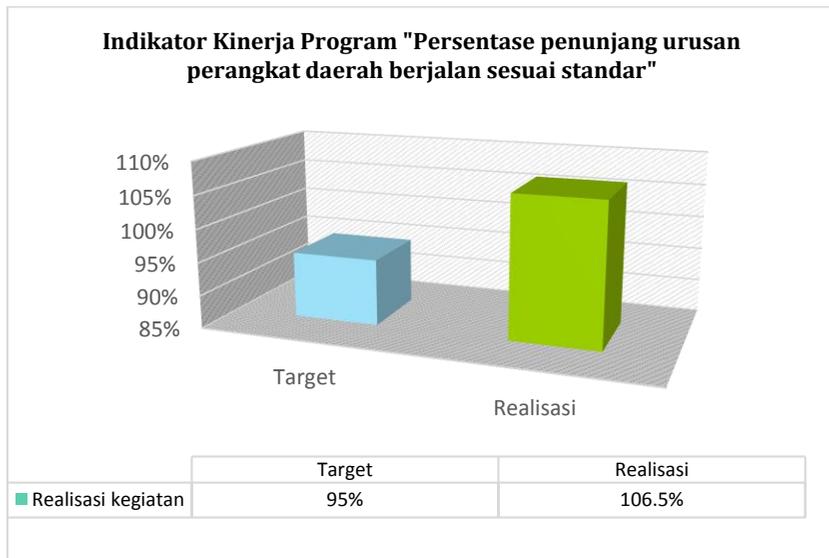
<b>2.</b>	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	93,33%	93,33%
<b>a.</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	15 Org	13 Org	86,67%
<b>b.</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	100%
<b>3.</b>	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
<b>a.</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	100%
<b>4.</b>	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	166,66%	166,66%
<b>a.</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Org	25 Org	166,66%
<b>5.</b>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100,4%	100,4%
<b>a.</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
<b>b.</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100%

		administrasi perkantoran				
<b>c.</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
<b>d.</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	100%
<b>e.</b>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	275 Org	100%
<b>f.</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	69 Kali	71 Kali	102,90%
<b>6.</b>	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	66,66%	66,66%
<b>a.</b>	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100%
<b>b.</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	13 Unit	13 Unit	100%
<b>c.</b>	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah pengadaan 72gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	0 Unit	0%
<b>7.</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	111.91%	111,91%
<b>a.</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	543 Surat	135,75%

<b>b.</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	36 Rek	100%
<b>c.</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	100%
<b>8.</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	113,6%	113,6%
<b>a.</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	12 Unit	92,3%
<b>b.</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	52 Unit	148,57%
<b>c.</b>	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

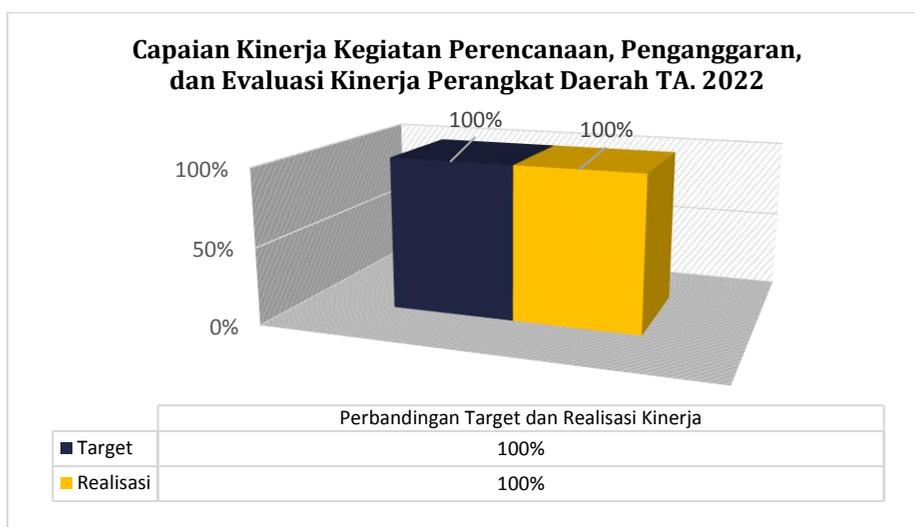
**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**



**Grafik. 23**  
Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2022

**Indikator Program adalah** Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 95% dan realisasi 106,5% dengan capaian kinerja 112,11%, dan menyerap anggaran sebesar 92,95%. Capaian kinerja program melebihi target karena terdapat beberapa kegiatan capaian kerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

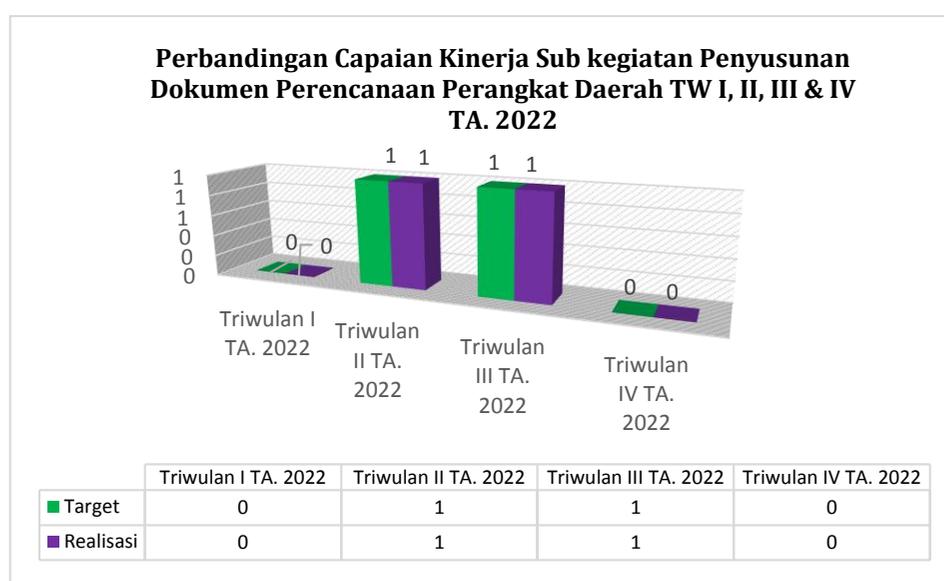
- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**



**Grafik 24**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

**Indikator kinerja kegiatan** adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi** : **Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 10 dokumen. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

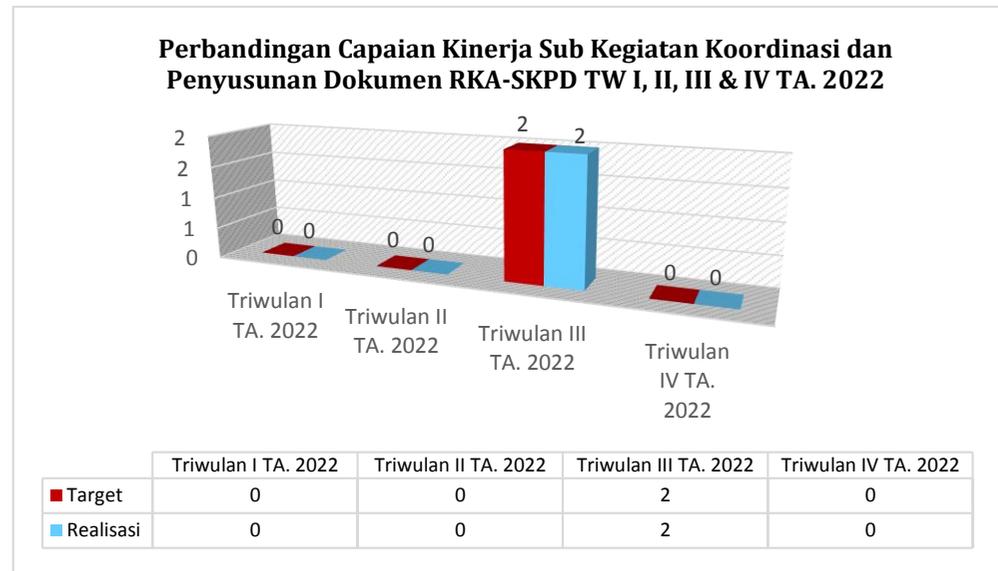


**Grafik. 25**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, IV TA. 2022**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Renja Tahun 2023 dan Renja Perubahan tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 28.126.145,- terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 2.731.145, belanja cetak Rp 3.500.000,- dan belanja makan dan minum rapat Rp 5.075.000 dan perjalanan dinas Rp 16.820.000 . Dengan realisasi keuangan Rp. 25.320.500 (90,02%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu anggaran belanja makanan dan minuman rapat disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk

mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas.

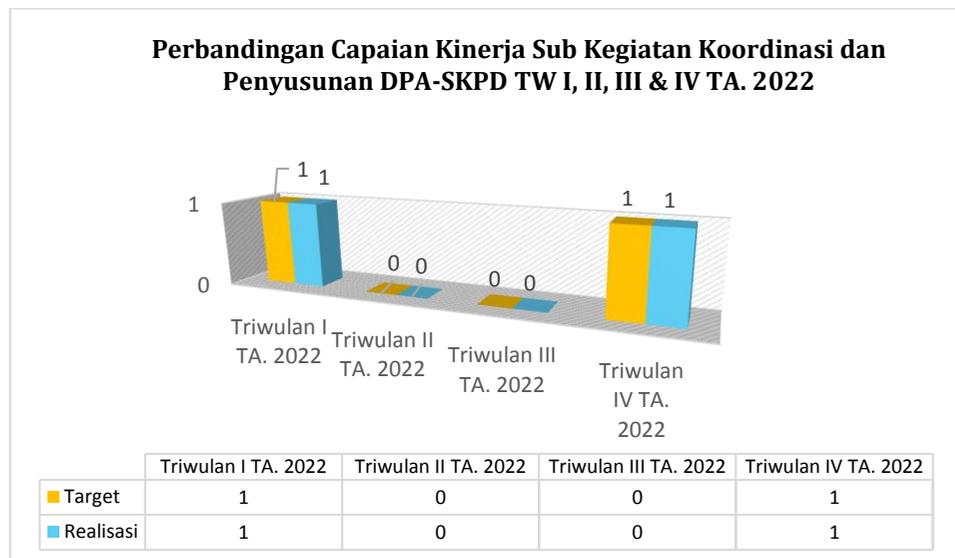
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**



**Grafik 26**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen (100%) yaitu penyusunan RKA Perubahan 2022 serta RKA Pokok 2023. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.785.466, terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 2.485.466, belanja cetak Rp1.250.000 dan belanja makan minum rapat Rp 1.050.000. Dan realisasi sebesar Rp 4.253.000 (88,87%). Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**



**Grafik. 27**

**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, IV TA. 2022**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2022 dan DPA Perubahan Tahun 2022. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.365.240, terdiri dari belanja ATK Rp 1.965.240 dan belanja cetak Rp 2.400.000. Realisasi keuangan Rp. 4.099.400 (93,91%). Terdapat sisa anggaran yaitu belanja cetak, dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

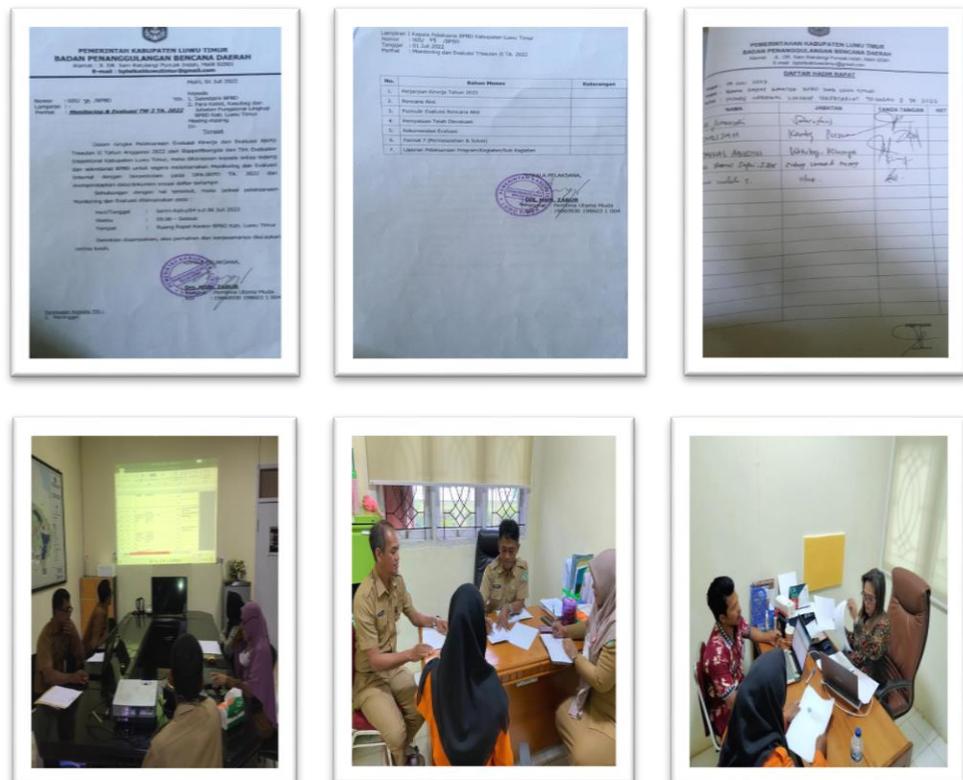


**Grafik. 28**

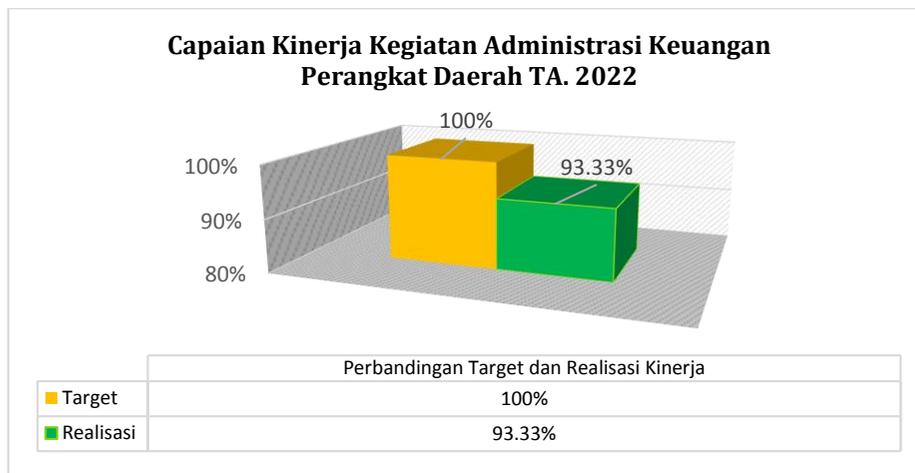
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu LPPD, LKPJ, Lapkin Tahun 2021, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2021, Dokumen Evaluasi Renja TW I, II & III TA. 2022 dan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2022. Disediakan anggaran sebesar Rp 48.262.280, terdiri dari belanja ATK Rp 5.097.280, belanja cetak Rp 2.750.000 dan belanja makan dan minum rapat Rp 6.825.000 dan perjalanan dinas Rp 33.590.000. Realisasi keuangan Rp. 45.794.280 (94,89%). Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan rapat. Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas.

#### [Dokumentasi Money Internal](#)



➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**



**Grafik. 29**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022**

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

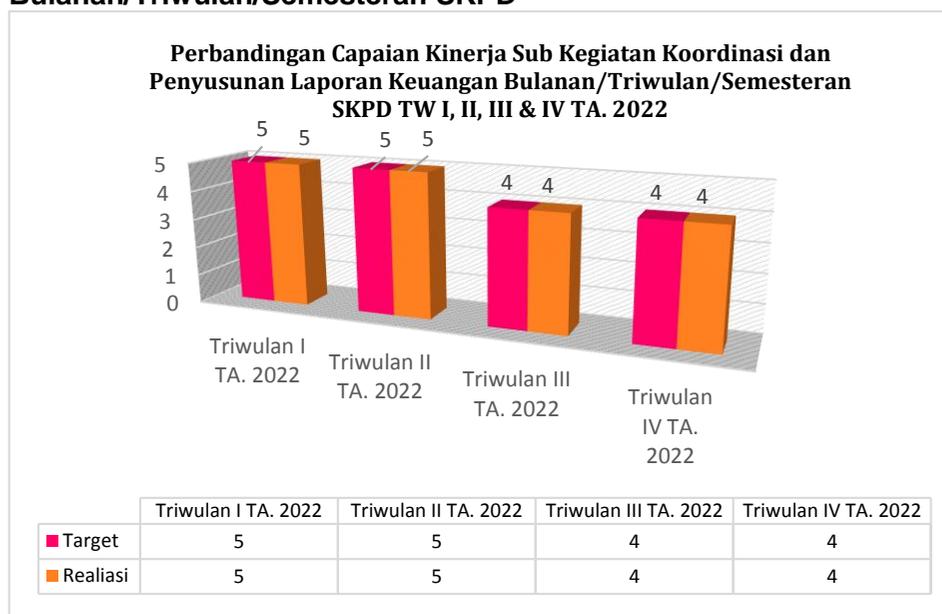
- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**



**Grafik. 30**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 15 org dan realisasi 13 org dengan persentase capaian kinerja 86,67 %. Dilakukan perubahan target kinerja pada saat perubahan anggaran yaitu dari 20 org menjadi 15 org. Target yang tidak tercapai karena adanya jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana yang belum terisi.. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.794.519.521, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan Rp 963.549.521, Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp 797.090.000, dan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp 33.880.000. Realisasi keuangan sebesar Rp 1.712.858.640,- atau (94,45%). Sisa anggaran yang tidak terealisasi karena disediakan anggaran untuk 2 org namun sampai dengan desember 2022, tidak terdapat penambahan ASN pada BPBD Kab. Luwu Timur.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

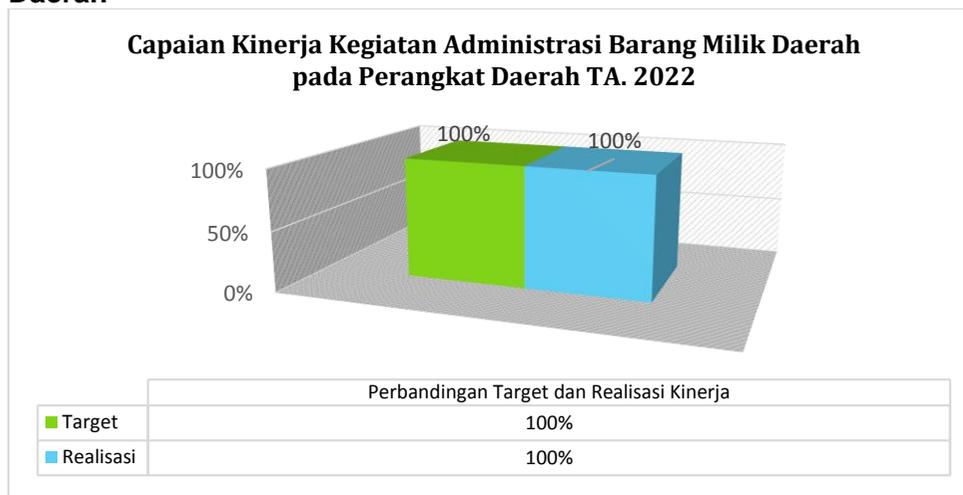


**Grafik 31**  
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu Laporan Keuangan Tahun 2021 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan I, II, III & IV sebanyak 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan laporan

semester I & II sebanyak 2 dokumen. Disediakan anggaran sebesar Rp 47.766.822, terdiri dari belanja honor pengelola keuangan Rp 19.800.000, belanja ATK Rp 5.746.822, belanja cetak Rp 1.920.000, belanja makan dan minum rapat Rp 350.000 serta belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp 7.950.000. Realisasi keuangan sebesar Rp 47.445.800,- atau (99.33%).

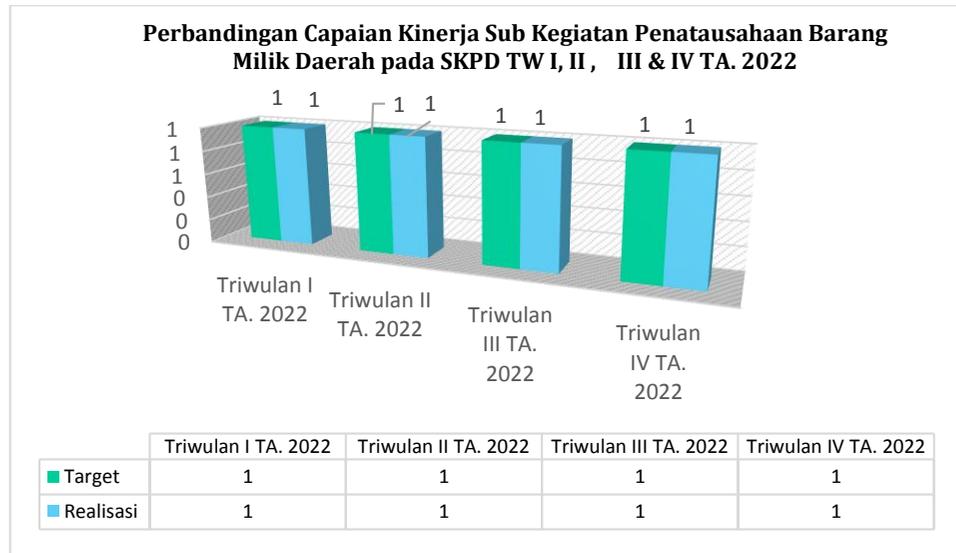
➤ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**



**Grafik 32**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**



**Grafik 33**

**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 18.009.260, terdiri dari belanja honor pengurus barang Rp 12.600.000, belanja ATK Rp 1.869.260, belanja cetak Rp 870.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 2.670.000. Realisasi keuangan Rp 15.270.000 (84.79%). Disediakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan BMD, namun tidak realisasi karena penyusunan laporan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**



**Grafik 34**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 166,67% dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Capaian kinerja melebihi target karena pada triwulan III dan IV, terdapat beberapa bimtek atau diklat yang dilaksanakan oleh OPD lain yang diikuti oleh personil BPBD dan pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

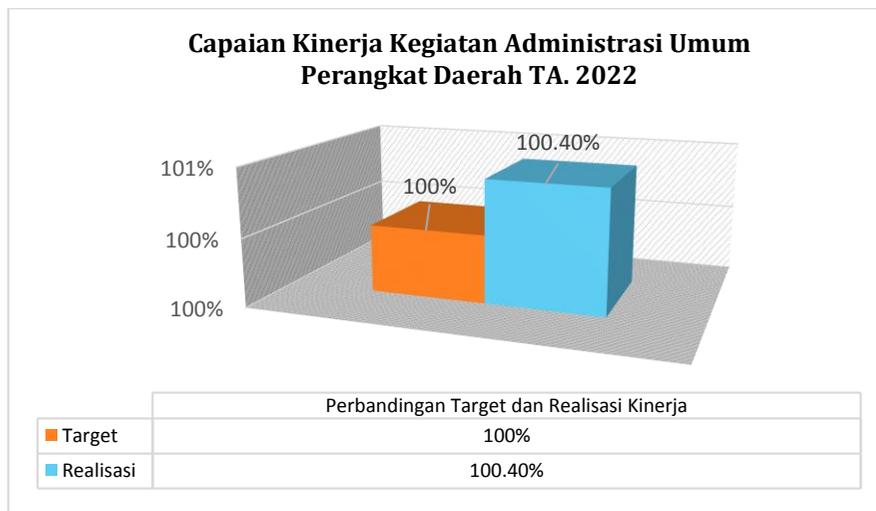
- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**



**Grafik 35**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target Tahun 2022 sebanyak 15 org dan realisasi 25 orang dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Bimtek SKP 1 org, Bimtek SAKIP 2 org, Bimtek Water Rescue 2 org, Coaching Klinik PMPRB 3 org dan Pendidikan dan Latihan Dasar Keselamatan Pelayaran 9 org), Diklat Teknis Jitupasna 1 org, Bimtek LKPJ & LPPD 1 org, Bimtek Pengelolaan Keuangan TAPD, Kepala OPD & Banggar 1 org, Bimtek SKPD 5 org. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 55.780.000, terdiri dari belanja kontribusi Rp 30.000.000, dan belanja perjalanan dinas Rp 25.780.000. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 43.583.850,- atau 78,14%. Sisa anggaran yang cukup besar adalah belanja biaya kontribusi Bimtek. Pada dasarnya penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta.

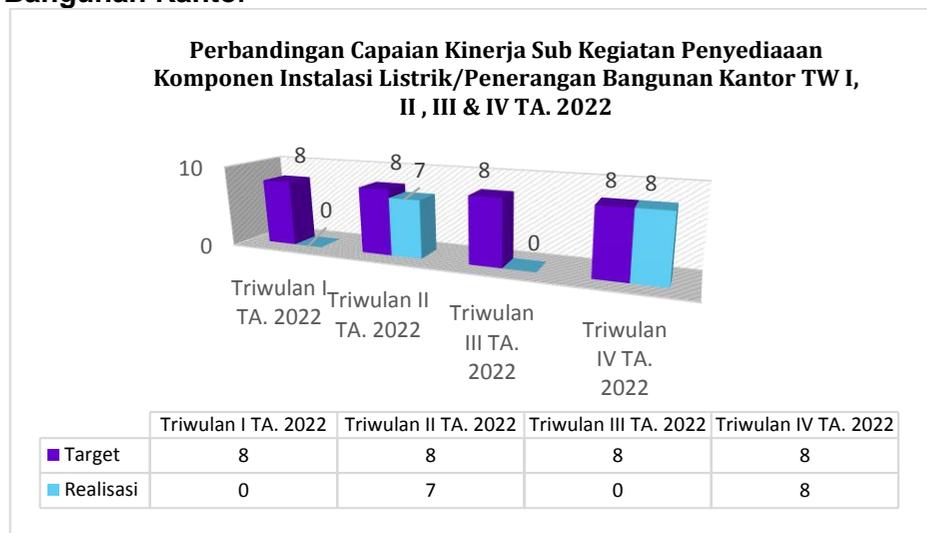
➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**



**Grafik 36**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100,4% dengan persentase capaian kinerja 100,4%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian >100%, dan capaian tersebut mempengaruhi capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

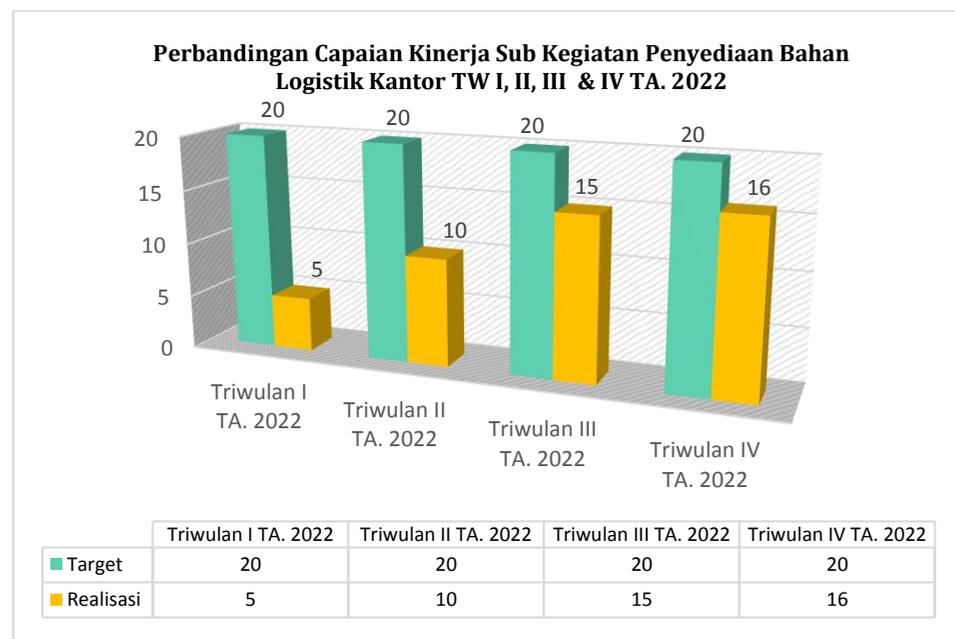
- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**



**Grafik. 37**  
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel Listrik, Lampu LED, Conector/Adaptor, Isolasi, Pitting, Kabel SR, Terminal, Steker, Lampu Sorot. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 24.625.000,- dengan realisasi keuangan Rp 21.404.000,- atau 86,92%. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena direncanakan pemasangan lampu sorot di halaman kantor, namun tidak terlaksana terkendala ketersediaan barang yang terbatas, sehingga yang semula direncanakan 8 unit terealisasi hanya 4 unit. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**



**Grafik 38**  
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 20 jenis (100%) terdiri dari BBM operasional 1 jenis, Oli Pelumas 2 jenis dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan yaitu Tissue, Harpic (pembersih kamar mandi), Super pel (pembersih lantai), Stella (pengharum ruangan), Sabun Cair, Alat pel,

sapu, sikat kamar mandi, sapu lidi bergagang, Tempat sampah besar, keranjang sampah, sikat kloset, alat pel, tempah sampah besar dan sedang, pembersih kamar mandi. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.349.250, terdiri dari belanja BBM/Pelumas Rp 22.324.000 dan belanja alat dan bahan pembersih Rp 7.025.250, dan terealisasi Rp 29.304.250,- atau 99,85%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

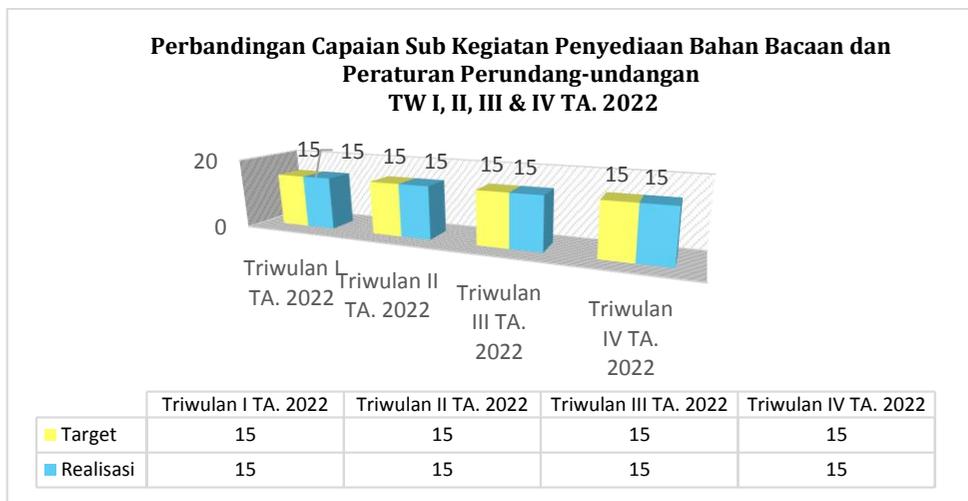
- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**



**Grafik 39**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Disediakan anggaran sebesar Rp 20.625.000, dan realisasi keuangan Rp 14.221.000,- atau 68,95%. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena disediakan anggaran belanja cetak baliho untuk papan himbauan peringatan dini, namun tidak direalisasikan karena kondisi baliho masih layak. Pada dasarnya penggunaan anggaran juga disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

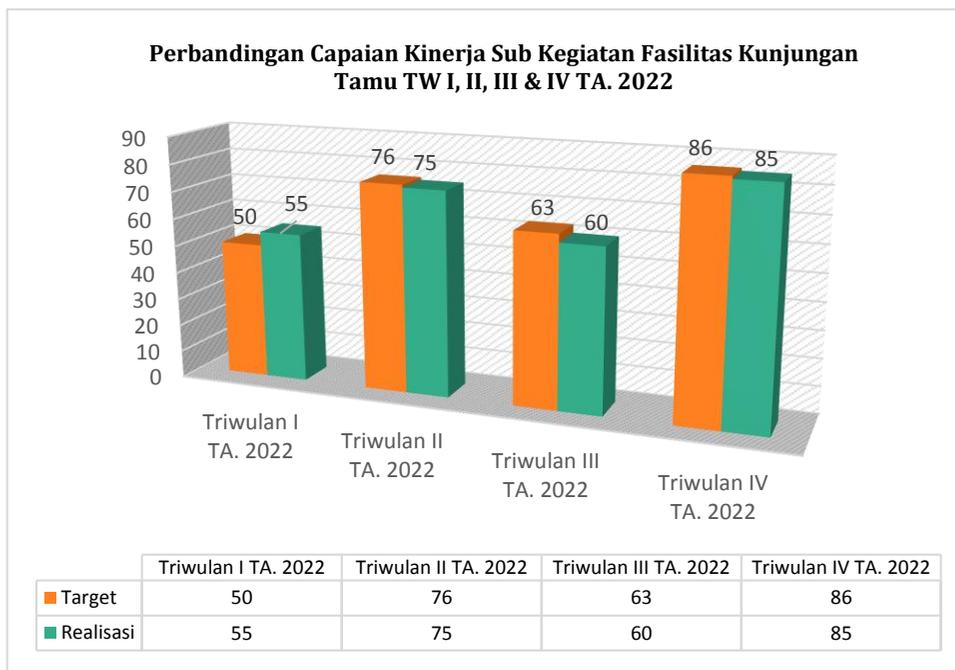
- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**



**Grafik 40**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, target tahun 2022 sebanyak 60 ekpl dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 ekpl, Koran Nasional 12 ekpl dan Koran Regional 36 ekpl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.720.000,- dan terealisasi Rp 6.720.000,- atau 100%.

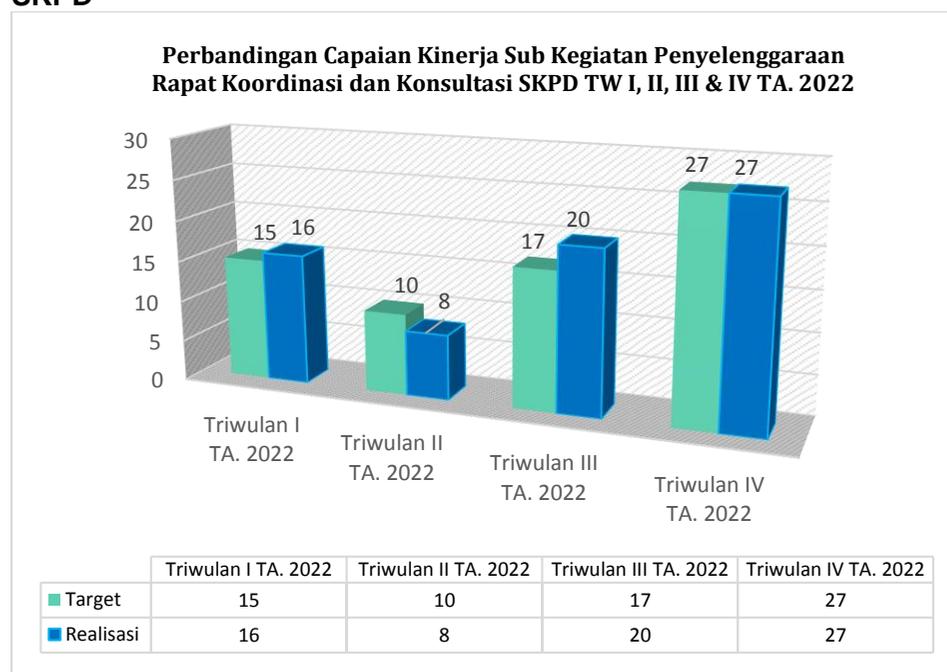
- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**



**Grafik 41**  
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target pada tahun 2022 sebanyak 275 org dan terealisasi 275 org dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.800.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.610.000,- atau 99,04%.

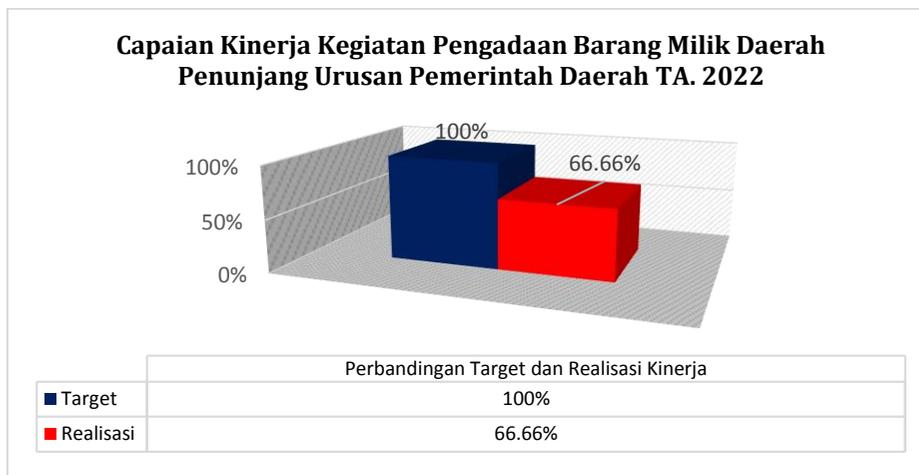
- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**



**Grafik 42**  
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target tahun 2022 sebanyak 69 kali dan terealisasi 71 kali dengan capaian kinerja 102,9%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan anggaran sebesar Rp 411.349.600, terdiri dari belanja jasa upah sopir Rp 18.000.000, belanja perjalanan dinas Rp 393.349.600. dengan realisasi keuangan Rp 410.498.955,- atau 99,79%.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



**Grafik 43**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target sebesar 100% dan realisasi 66,66%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 3 sub kegiatan yang direncanakan, 1 diantaranya yang tidak terealisasi yaitu Pembangunan Tempat Parkir. Hal ini mempengaruhi capaian kegiatan secara keseluruhan.. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Pengadaan Mebel**



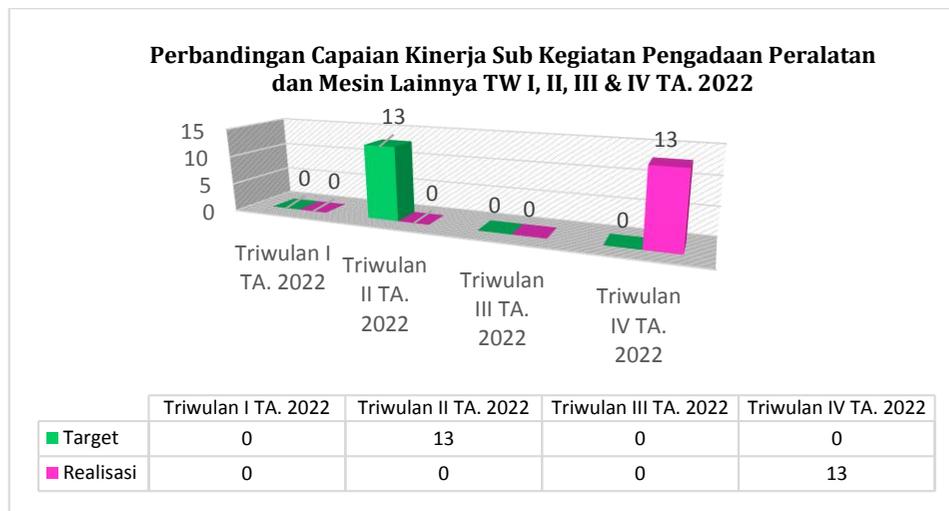
**Grafik 44**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah mebel yang diadakan, dengan target pengadaan kursi kerja eselon IV sebanyak 4 unit dan terealisasi 4 unit (100%) yaitu Pengadaan Kursi kerja eselon IV. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2022, namun baru terealisasi pada Triwulan IV karena terkendala pada harga di e-catalog yang lebih tinggi dibanding harga melalui pembelian langsung pada toko, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pejabat pengadaan, maka pembelian barang dilakukan melalui mbizmarket. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 8.000.000, dan realisasi keuangan Rp 7.770.000,- atau 97,13%. Terdapat sisa anggaran Rp 230.000,- yang merupakan sisa kontrak/SPK.

#### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**



**Grafik 45**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, target 13 unit dan terealisasi 13 unit (100%) yaitu Pengadaan Locker 2 pintu sebanyak 10 unit, Rak Arsip 2 unit dan Filling Kabinet 2 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2022, namun baru terealisasi pada Triwulan IV karena terkendala pada harga di e-catalog yang lebih tinggi dibanding harga melalui pembelian langsung pada toko, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pejabat pengadaan, maka pembelian barang dilakukan melalui mbizmarket. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.268.000, terdiri dari belanja Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp 10.500.000 dan belanja alat kantor lainnya Rp 18.768.000, dan terealisasi Rp 27.634.300 atau 94,42%. Terdapat sisa anggaran Rp 1.634.000,- yang merupakan sisa kontrak/SPK.

Dokumentasi

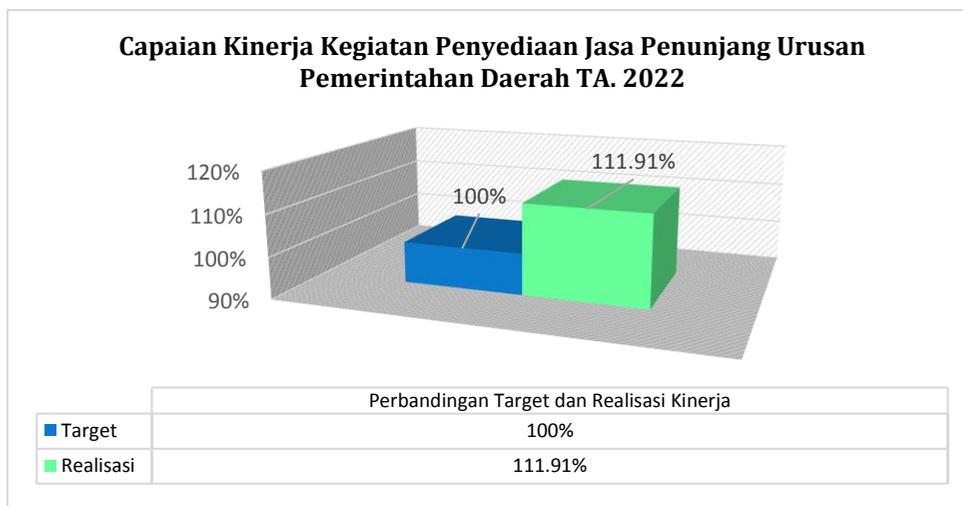


- **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**  
**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, target 1 unit dan realisasi 0 unit (0%). Berdasarkan anggaran kas, pengadaan bangunan parkir direncanakan pada triwulan III TA. 2022, namun tidak terlaksana karena terkendala jasa konsultan yang terbatas serta kurangnya minat karena pagu anggaran yang sangat minim. Disamping itu besaran jasa konsultan masih dibawah besaran remunerasi. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 74.900.000 dan realisasi keuangan 0%.



**Grafik 46**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

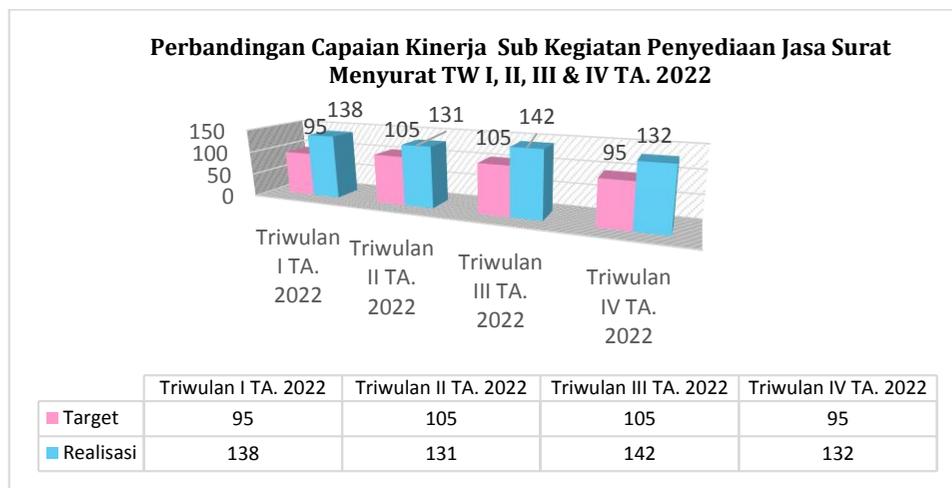
➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**Grafik 47**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 111,91% dengan persentase capaian kinerja 111,91%. Capaian kinerja melebihi dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, capaian kinerjanya >100% sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

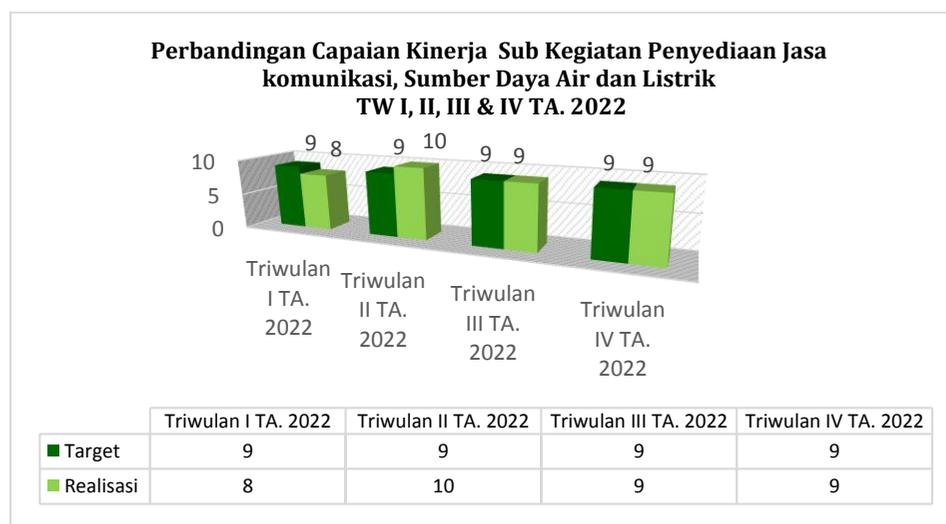
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**



**Grafik 48**  
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 202

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target tahun 2022 sebanyak 400 surat dan terealisasi 543 surat dengan persentase capaian kinerja 135,75%. Terdiri dari 354 surat masuk dan 189 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.195.475,- terdiri dari belanja ATK Rp 2.745.475, belanja materai Rp 1.350.000 dan belanja paket pengiriman Rp 100.000. Dan terealisasi Rp 3.969.000,- atau 94,60%. Terdapat sisa belanja ATK dan paket pengiriman sebesar Rp 226.475,- Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

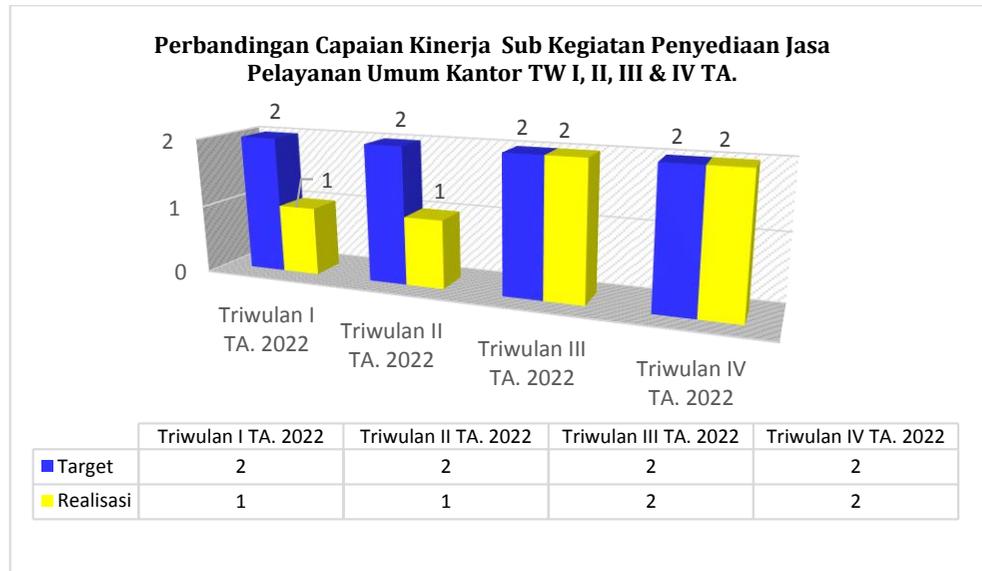
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**



**Grafik 49**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target tahun 2022 sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. terdiri dari Listrik BPBD 12 rek, Token listrik gudang logistik 2 rek, Air kantor 12 rek, kartu halo 10 rek dengan persentase capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 43.952.640,- terdiri dari belanja tagihan telepon Rp 1.200.000, belanja tagihan air Rp 1.512.000 dan belanja tagihan listrik Rp 41.240.640. Dan terealisasi Rp 40.703.844,- atau 92,61%. Terdapat sisa anggaran belanja listrik yang cukup besar karena pemakaian token listrik pada Pusalops mengalami penurunan. Penggunaan anggaran bersifat Riil Cost.

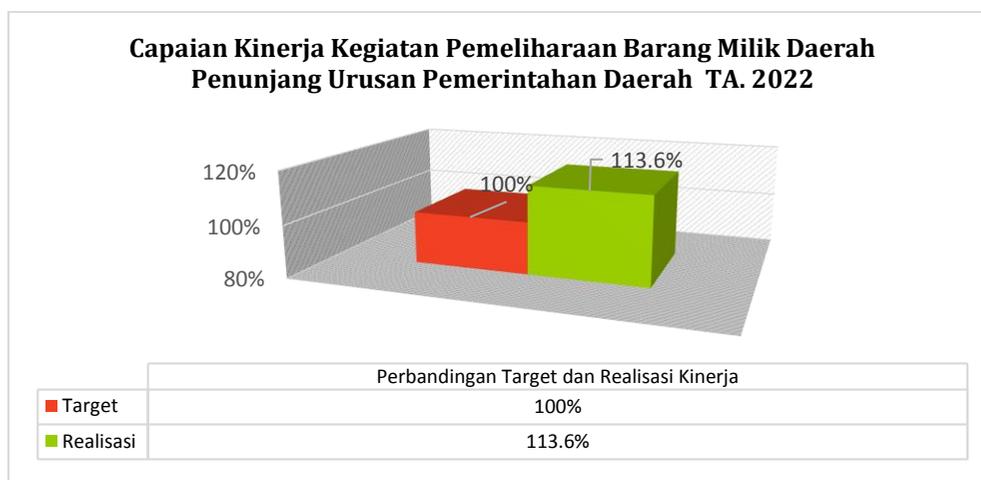
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**



**Grafik 50**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan pejabat pengadaan. Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 19.800.000,- terdiri dari belanja honor upah jasa cleaning service Rp 15.000.000,- dan belanja honor pejabat pengadaan Rp 4.800.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.200.000,- atau 91,92%. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena terdapat sisa anggaran honor pejabat pengadaan sebesar Rp 1.600.000 yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena SK Pejabat Pengadaan berlaku Mei 2022 sehingga honor yang terbayarkan hanya 8 bulan.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

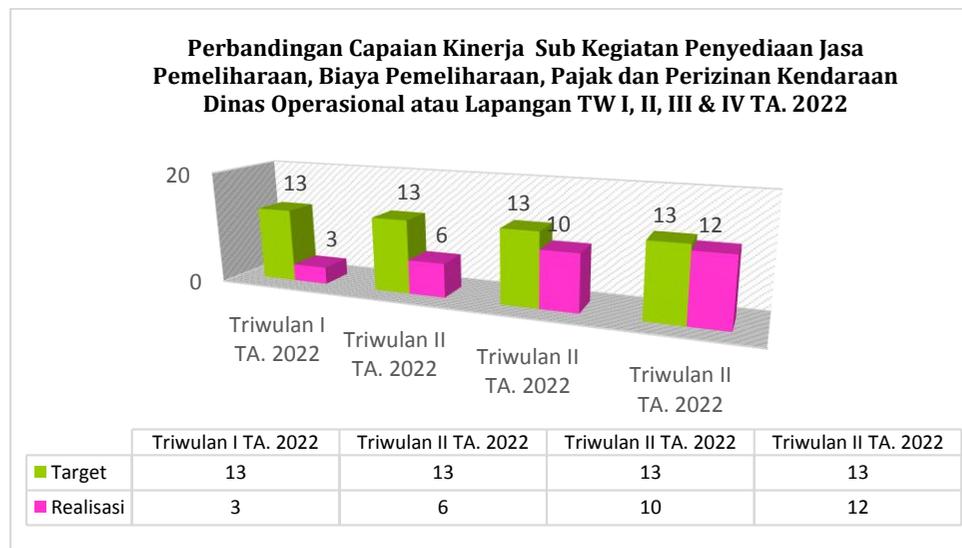


**Grafik 51**

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 113,6% dengan persentase capaian kinerja 113,6%. Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah melebihi target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya 148,57%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan, faktor yang mempengaruhinya adalah SBM untuk 1 unit peralatan bisa untuk membiayai beberapa peralatan lainnya. Dan pada dasarnya BMD yang dipelihara adalah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

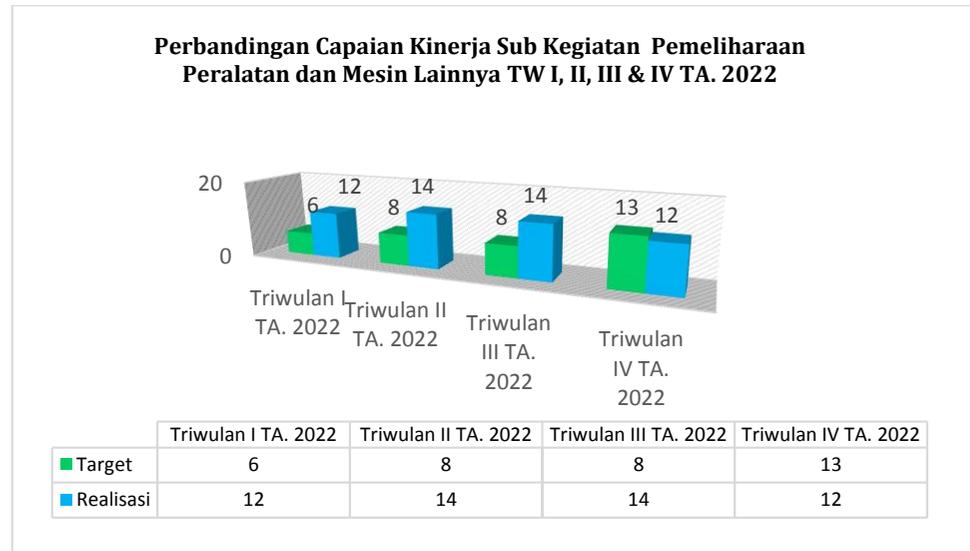
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**



**Grafik 52**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 13 unit dan realisasi 12 unit dengan persentase capaian kinerja 92,31%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 8 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit, Double Cabin 2 unit, dan mobil Operasional TRC 1 unit. Disediakan anggaran sebesar Rp 94.050.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 15.150.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 78.900.000,-. Dan terealisasi Rp 93.966.068,- atau 99,91%. Realisasi keuangan lebih besar dari realisasi kinerja karena kondisi beberapa kendaraan dinas roda empat sering mengalami kerusakan, disamping karena umur ekonomisnya yang lebih dari 10 tahun juga mobilitas yang tinggi. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan/perbaikan.

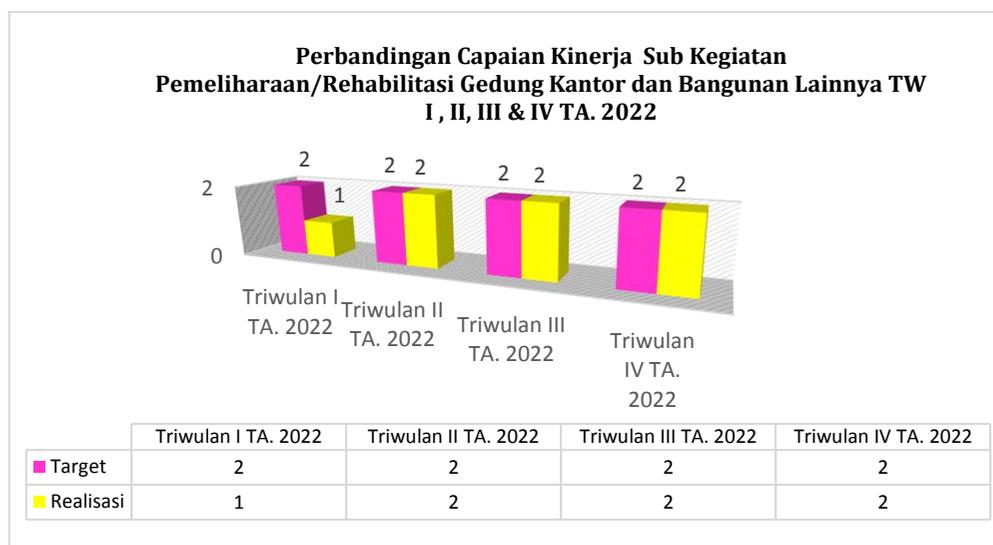
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**



**Grafik 53**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target tahun 2022 sebanyak 35 unit dan terealisasi 52 unit dengan persentase capaian kinerja 148,57%. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan yaitu AC 5 unit, printer 10 unit, PC 7 unit, Laptop 10 unit, chainsaw 4 unit (11 kali perbaikan), Genset 4 unit, Mesin babat 1 unit. Capaian yang melebihi target karena besaran anggaran yang disediakan untuk setiap unit peralatan sesuai dengan SBM, cukup untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 23.690.000,- terdiri dari belanja pemeliharaan alat berat-alat bantu-Elektrik Generating Set Rp 4.000.000,- belanja alat angkut apung tak bermotor Rp 1.400.000,- belanja pemeliharaan alat-alat kantor lainnya Rp 5.800.000,- dan belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp 12.490.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp 23.505.000,- atau 99,22%. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**



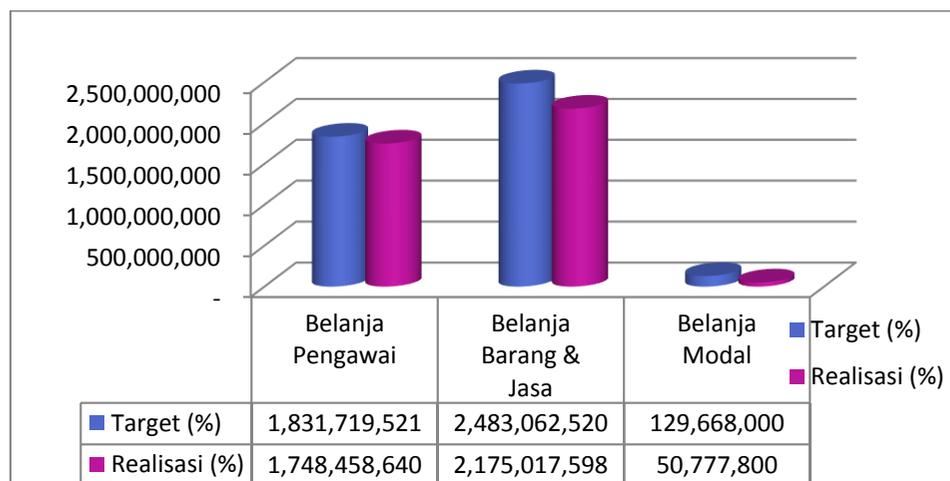
**Grafik 54**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022**

**Indikator kinerja sub kegiatan** adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Perbaikan pintu toilet kantor BPBD dan Rabat Pelataran Kantor BPBD, Perbaikan Pintu, Perbaikan Ruang Kerja dan Perbaikan Kamar Mandi Pusdalops. Disediakan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasi Rp 16.020.000,- atau 80,10%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena direncanakan pemasangan papan nama kantor (menggunakan Neon Box) namun tidak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tahun 2023 akan dilakukan Pembangunan Papan Nama Kantor. Penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.444.450.041,-** (*Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 1.831.719.521,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.483.062.520,-** dan belanja modal **Rp 129.668.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 37 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Grafik 55**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

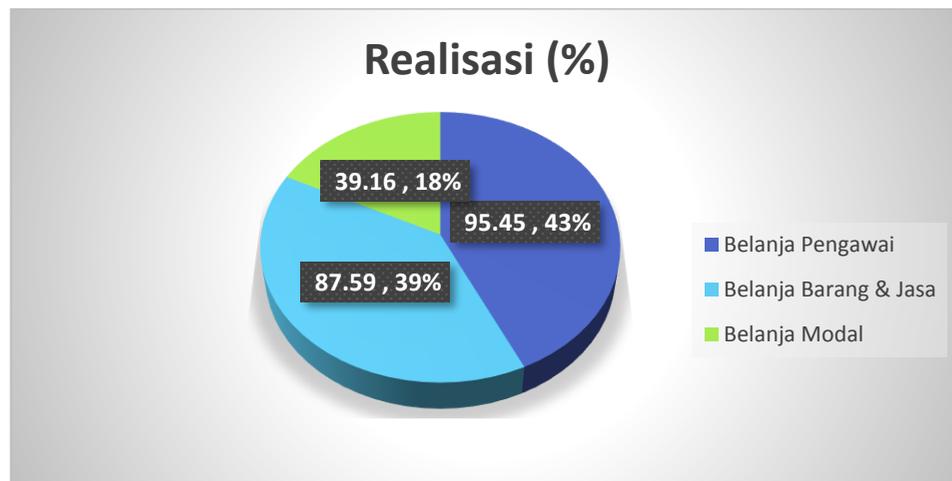


Diagram.1 Persentase Serapan Anggaran Tahun 2021

**Tabel. 25**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

No.	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Target			Realisasi	%
		Pagu	Realisasi	(%)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				$(4/3 \times 100)$					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4,444,450,041	3,974,254,038	89.42					
<b>A</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2,831,939,699	2,632,151,887	92.95	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95	%	106.5	112.11
<b>I</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,539,131	79,467,180	92.90	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	%	100	100
<b>1</b>	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,126,145	25,320,500	90.02	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	2	%	2	100
<b>2</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,785,466	4,253,000	88.87	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2	%	2	100
<b>3</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,365,240	4,099,400	93.91	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat waktu	2	%	2	100
<b>4</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,262,280	45,794,280	94.89	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	%	10	100
<b>II</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,842,286,343	1,760,304,440	95.55	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	93.33	93.33

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,794,519,521	1,712,858,640	95.45	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	15	%	13	86.67
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47,766,822	47,445,800	99.33	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18	%	18	100
III	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>18,009,260</b>	<b>15,270,000</b>	<b>84.79</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18,009,260	15,270,000	84.79	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	Dokumen	4	100
IV	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55,780,000</b>	<b>43,583,850</b>	<b>78.14</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>166.67</b>	<b>166.67</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55,780,000	43,583,850	78.14	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15	orang	25	166.67
V	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>512,468,850</b>	<b>501,758,205</b>	<b>97.91</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.4</b>	<b>100.40</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,625,000	21,404,000	86.92	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8	jenis	8	100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,349,250	29,304,250	99.85	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	jenis	20	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,625,000	14,221,000	68.95	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3	jenis	3	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,720,000	6,720,000	100.00	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	expl	60	100
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	19,800,000	19,610,000	99.04	Jumlah tamu yang difasilitasi	275	orang	275	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411,349,600	410,498,955	99.79	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	69	kali	71	102.90
VI	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>112,168,000</b>	<b>35,404,300</b>	<b>31.56</b>	<b>Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>66.66</b>	<b>66.66</b>
1	Pengadaan Mebel	8,000,000	7,770,000	97.13	Jumlah mebel yang diadakan	4	unit	4	100
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,268,000	27,634,300	94.42	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	13	unit	13	100
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74,900,000	-	-	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit	0	-
VII	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67,948,115</b>	<b>62,872,844</b>	<b>92.53</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>111.91</b>	<b>111.91</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,195,475	3,969,000	94.60	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400	surat	543	135.75

2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,952,640	40,703,844	92.61	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36	rekening	36	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,800,000	18,200,000	91.92	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2	orang	2	100
VIII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>137,740,000</b>	<b>133,491,068</b>	<b>96.92</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>113.6</b>	<b>113.60</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,050,000	93,966,068	99.91	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	13	unit	12	92.31
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,690,000	23,505,000	99.22	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35	unit	52	148.57
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	16,020,000	80.10	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	2	100
B	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1,612,510,342</b>	<b>1,342,102,151</b>	<b>83.23</b>	<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>92.16</b>	<b>92.16</b>
					<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
					<b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
IX	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>72,518,925</b>	<b>71,572,000</b>	<b>98.69</b>	<b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>0.09</b>	<b>%</b>	<b>0.09</b>	<b>100</b>
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	72,518,925	71,572,000	98.69	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	262	orang	262	100
X	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>611,728,418</b>	<b>499,147,424</b>	<b>81.60</b>	<b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>2.117</b>	<b>%</b>	<b>2.118</b>	<b>100.05</b>
					<b>Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	76,939,270	69,001,000	89.68	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	orang	90	90
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranaan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	58,000,000	52,836,000	91.10	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	47	unit	47	100
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	128,622,720	91,815,650	71.38	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4	Desa	4	100
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	64,014,850	59,223,000	92.51	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	40	orang	40	100

5	Penyusunan Rencana Kontijensi	191,799,980	136,031,150	70.92	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1	Dokumen	1	100
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	59,971,628	58,007,424	96.72	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1	Dokumen	1	100
					Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1	Dokumen	1	100
7	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	32,379,970	32,233,200	99.55	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250	orang	262	104.80
XI	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>908,272,910</b>	<b>762,531,527</b>	<b>83.95</b>	<b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	665,091,800	615,551,400	92.55	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100	%	100	100
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69,477,500	62,161,700	89.47	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	100	100
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85,422,750	66,851,027	78.26	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100	%	100	100
4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	29,254,820	700,000	2.39	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	100	100
5	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah PenyakitAktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	59,026,040	17,267,400	29.25	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100	%	100	100
XII	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>19,990,089</b>	<b>8,851,200</b>	<b>44.28</b>	<b>Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19,990,089	8,851,200	44.28	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	3	%	3	100
<b>TOTAL</b>		<b>4,444,450,041</b>	<b>3,974,254,038</b>	<b>89.42</b>					

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

**Tabel.26**  
**Permasalahan dan Solusi**

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 dan Dokumen Renja Perubahan 2022, dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 28.126.145,- terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 2.731.145, belanja cetak Rp 3.500.000,- dan belanja makan dan minum rapat Rp 5.075.000 dan perjalanan dinas Rp 16.820.000 . Dengan realisasi keuangan Rp. 25.320.500 (90,02%). Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi 2 dokumen yaitu Dokumen RKA 2023 dan RKA-P 2022 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 4.785.466, terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 2.485.466, belanja cetak Rp1.250.000 dan belanja makan minum rapat Rp 1.050.000. Dan realisasi sebesar Rp 4.253.000 (88,87%).	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen, sedangkan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2022 dan DPPA-SKPD Tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 4.365.240, terdiri dari belanja ATK Rp 1.965.240 dan belanja cetak Rp 2.400.000. Realisasi keuangan Rp. 4.099.400 (93,91%).	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun target yang direncanakan s.d triwulan IV yaitu tersusunnya 10 dokumen yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2021, Dokumen Evaluasi Renja TW I, II & III TA. 2022 dan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2022 dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 48.262.280, terdiri dari belanja ATK Rp 5.097.280, belanja cetak Rp 2.750.000 dan belanja makan dan minum rapat Rp 6.825.000 dan perjalanan dinas Rp 33.590.000. Realisasi keuangan Rp. 45.794.280 (94,89%). Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 15 org dan terealisasi hanya 13 org sehingga capaian kinerja 86,66 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan dan staf (pengurus barang) yang belum terisi personil.	Disediakan anggaran kas pada s.d triwulan IV sebesar Rp 1.794.519.521, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan Rp 963.549.521, Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp 797.090.000, dan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp 33.880.000. Realisasi keuangan sebesar Rp 1.712.858.640,- atau (94,45%). Sisa anggaran yang tidak terealisasi karena disediakan anggaran untuk 2 org namun sampai dengan desember 2022, tidak terdapat penambahan ASN pada BPBD Kab. Luwu Timur	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan IV sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2021 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan I, II, III & IV sebanyak 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan laporan semester 1 & 2 sebanyak 2 dokumen, dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 47.766.822, terdiri dari belanja honor pengelola keuangan Rp 19.800.000, belanja ATK Rp 5.746.822, belanja cetak Rp 1.920.000, belanja makan dan minum rapat Rp 350.000 serta belanja jasa tenaga pelayanan umu Rp 7.950.000. Realisasi keuangan sebesar Rp 47.445.800,- atau (99,33%).	
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</b>			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target sebanyak 4 dokumen. Adapun target s.d triwulan IV TA. 2022 yaitu tersusunnya Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 18.009.260, terdiri dari belanja honor pengurus barang Rp 12.600.000, belanja ATK Rp 1.869.260, belanja cetak Rp 870.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 2.670.000. Realisasi keuangan Rp 15.270.000 (84,79%). Disediakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan BMD, namun tidak realisasi karena penyusunan laporan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			

1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, target s.d triwulan III sebanyak 15 orang dan terealisasi 25 org (Bimtek SKP 1 org, Bimtek SAKIP 2 org, Bimtek Water Rescue 2 org, Coaching Klinik PMPRB 3 org dan Pendidikan dan Latihan Dasar Keselamatan Pelayaran 9 org), Diklat Teknis Jitupasna 1 org, Bimtek LKPJ & LPPD 1 org, Bimtek Pengelolaan Keuangan TAPD, Kepala OPD & Banggar 1 org, Bimtek SKPD 5 org dengan capaian kinerja 166,66%. Capaian kinerja melebihi target karena pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 55.780.000, terdiri dari belanja kontribusi Rp 30.000.000, dan belanja perjalanan dinas Rp 25.780.000. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 43.583.850 (78,14%). Sisa anggaran yang cukup besar adalah belanja biaya kontribusi Bimtek. Pada dasarnya penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta.	Agar PPTK lebih mencermati rencana bimtek/diklat yang membutuhkan kontribusi pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 8 jenis dan terealisasi 8 jenis yaitu jenis Kabel Listrik, Lampu LED, Conector/Adaptor, Isolasi, Pitting, Kabel SR, Terminal, Steker, Lampu Sorot dengan capaian kinerja 100%.Penggunaan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Dan disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 24.625.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 21.404.000 (86,92%). Direncanakan pemasangan lampu sorot di halaman kantor, namun tidak terlaksana terkendala ketersediaan barang yang terbatas, sehingga yang semula direncanakan 8 unit terealisasi hanya 4 unit. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Agar PPTK lebih mencermati kebutuhan alat listrik kantor pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 20 jenis yaitu BBM operasional 1 jenis, Oli Pelumas 2 jenis dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan yaitu Tisu, Harpic (pembersih kmr mandi), Super pel (pembersih lantai), Stella (pengharum ruangan), Sabun Cair, Alat pel, sapu, sikat kamar mandi, sapu lidi bergagang, Tempat sampah besar, keranjang sampah, sikat kloset, alat pel, tempah sampah besar dan sedang, pembersih kamar mandi dengan persentase capaian kinerja 100%. Penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 29.349.250, terdiri dari belanja BBM/Pelumas Rp 22.324.000 dan belanja alat dan bahan pembersih Rp 7.025.250, dan terealisasi Rp 29.304.250 (99,85%)	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan sesuai anggaran kas yang telah direncanakan.
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 20.625.000, dan realisasi keuangan sebesar 14.221.000 (68,95%). Realisasi keuangan tidak sesuai target karena disediakan belanja cetak baliho untuk papan himbauan peringatan dini, namun tidak direalisasikan karena kondisi baliho masih layak. Penggunaan anggaran juga disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.

1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan target pada triwulan III sebanyak 60 expl dan realisasi 60 expl yaitu koran lokal 12 expl, koran nasional 12 expl, koran regional 36 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 6.720.000, dan realisasi keuangan sebesar 6.720.000 (100%).	
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 275 org dan terealisasi 275 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 19.800.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.610.000 (99,04%),	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target sampai dengan triwulan IV sebanyak 69 kali dan realisasi 71 kali, capaian kinerja 102,89%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 411.349.600, terdiri dari belanja jasa upah sopir Rp 18.000.000, belanja perjalanan dinas Rp 393.349.600. dengan realisasi keuangan Rp 410.498.955 (99,79%).	Agar PPTK mencermati perubahan target pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 4 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2022, namun baru terealisasi pada Triwulan IV karena terkendala pada harga di e-catalog yang lebih tinggi dibanding harga melalui pembelian langsung pada toko, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pejabat pengadaan, maka pembelian barang melalui mbizmarket, dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 8.000.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 7.770.000 (97,13%). Realisasi anggaran sesuai dengan nilai SPK.	Kedepannya untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat pengadaan.
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan sebanyak 13 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan tersebut direncanakan pada triwulan II TA. 2022, namun belum terealisasi pada Triwulan IV karena terkendala pada harga di e-catalog yang lebih tinggi dibanding harga melalui pembelian langsung pada toko, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pejabat pengadaan, maka pembelian barang melalui mbizmarket, Adapun peralatan yang diadakan adalah locker 2 pintu 10 unit, rak arsip 2 unit dan filling kabinet 1 unit, dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 29.268.000, terdiri dari belanja Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp 10.500.000 dan belanja alat kantor lainnya Rp 18.768.000, dan terealisasi Rp 27.634.300 (94,42%). Realisasi anggaran sesuai dengan nilai SPK.	Kedepannya untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat pengadaan.
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan bangunan parkir direncanakan pada triwulan III TA. 2022, namun tidak terlaksana karena terkendala jasa konsultan yang terbatas serta kurangnya minat karena pagu anggaran yang sangat minim. Disamping itu besaran jasa konsultan masih dibawah besaran remunerasi	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 74.900.000 dan realisasi keuangan masih 0%.	Kedepannya untuk mencermati pekerjaan fisik yang berkaitan dengan remunerasi jasa konsultan dan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat pengadaan

1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 400 surat dan realisasi 543 surat dengan persentase capaian kinerja 135,75%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 4.195.475,- terdiri dari belanja ATK Rp 2.745.475, belanja materai Rp 1.350.000 dan belanja paket pengiriman Rp 100.000. Dan terealisasi Rp 3.969.000 (94,60%).	PPTK untuk mencermati perubahan target pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 36 rekening dan realisasi 27 rekening yaitu Listrik BPBD 12 rek, Token listrik gudang logistik 3 rek, Air kantor 11 rek, kartu halo 10 rek. Persentase capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 43.952.640,- terdiri dari belanja tagihan telepon Rp 1.200.000, belanja tagihan air Rp 1.512.000 dan belanja tagihan listrik Rp 41.240.640. Dan terealisasi Rp 40.703.844 (92,61%). Penggunaan anggaran bersifat Riil Cost.	PPTK untuk mencermati realisasi anggaran pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Dan terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 org yaitu Pejabat Pengadaan dan Upah Jasa Cleaning Service dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 19.800.000,-.Terdiri dari belanja honor upah jasa cleaning service Rp 15.000.000 dan belanja honor pejabat pengadaan Rp 4.800.000. Dan realisasi Rp 18.200.000 (91,92%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.600.000 karena SK Pejabat Pengadaan berlaku Mei 2022 sehingga honor yang terbayarkan hanya 8 bulan.	Kedepannya PPTK untuk mencermati SK Pejabat Pengadaan dan menyesuaikan pada saat perubahan anggaran
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi pada triwulan IV sebanyak 12 unit yaitu Pemeliharaan mobil Hilux 1 unit, Mobil Rescue 1 unit, Mobil Operasional TRC 1, Mobil Truck Serbaguna 1 unit, unit, Motor 8 unit dengan persentase capaian kinerja 92,30%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp 94.050.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 15.150.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 78.900.000,-.Dan terealisasi Rp 93.966.068 (99,91%). Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan.	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 35 unit dan terealisasi 52 unit yaitu AC 3 unit, printer 10 unit, PC 7 unit, Laptop 10 unit, chainsaw 4 unit (11 kali perbaikan), Genset 4 unit, Mesin baabat 1 unit, dengan persentase capaian kinerja 148,57%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 23.690.000,- terdiri dari belanja pemeliharaan alat berat-alat bantu-ElectrikGenerating Set Rp 4.000.000, belanja alat angkutan apung tak bermotor Rp 1.400.000, belanja pemeliharaan alat-alat kantor lainnya Rp 5.800.000, belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp 12.490.000.Realisasi keuangan Rp 23.505.000 (99,22%) Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan kantor.	Untuk tetap melakukan inventarisasi peralatan sesuai kondisi yang ada diakhir tahun untuk antisipasi kejadian bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit yaitu perbaikan pada gudang logistik, Perbaikan pintu toilet kantor BPBD dan Rabat Pelataran Kantor BPBD, Perbaikan Pintu, Perbaikan Ruang Kerja, Perbaikan Kamar Mandi Pusdalops. Dengan capaian kinerja 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasi Rp 16.020.000 (80,10%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena direncanakan pemasangan papan nama kantor (Neon Box) namun tidak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tahun 2023 akan dilakukan Pembangunan Papan Nama Kantor.	PPTK mencermati kondisi gedung kantor dan menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi pada triwulan IV sebanyak 12 unit yaitu Pemeliharaan mobil Hilux 1 unit, Mobil Rescue 1 unit, Mobil Operasional TRC 1, Mobil Truck Serbaguna 1 unit, unit, Motor 8 unit dengan persentase capaian kinerja 92,30%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp 94.050.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 15.150.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 78.900.000,-.Dan terealisasi Rp 93.966.068 (99,91%). Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan.	
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target awal sebanyak 300 org dan setelah perubahan berubah menjadi 262 org dan terealisasi 262 org dengan persentase capaian kinerja 100%. Target yang tercapai karena dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran. Adapun sasaran kegiatan adalah tenaga pengajar SD, SLTP & SLTA mewakili dari 11 kecamatan.	Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 72.518.925,- dan realisasi keuangan Rp. 71.572.000,- atau sebesar 98,69% dengan jumlah peserta 262 orang peserta.	
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah aparaturnya dan warga Negara yang ikut pelatihan, dengan target sebanyak 100 orang, dengan realisasi 90 org, persentase capaian kinerja 90%. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 dan dihadiri oleh Kepala Sekolah tingkat SD dan SLTP dari 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.	Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 76.939.270,- dan realisasi keuangan Rp. 69.001.000,- atau sebesar 81,60 % dengan jumlah peserta 90 orang dari 100 orang peserta. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 7.938.270,- karena jumlah peserta yang hadir tidak sesuai target, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan	Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu sehingga sisa anggaran dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran

1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 20 unit kantung jenazah Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2022, namun belum dapat dilaksanakan karena dilakukan perubahan terkait jenis barang yang akan diadakan. Dengan pertimbangan bahwa ketersediaan kantung jenazah masih cukup sedangkan life jacket dan chainsaw sangat dibutuhkan. Pada perubahan anggaran target berubah menjadi 47 unit terdiri dari Chainsaw 2 unit dan Life Jacket (pelampung) 45 unit dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp. 58.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 52.836.000,- atau sebesar 91,10 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.164.000,- yang merupakan sisa belanja (sisa SPK)	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 4 desa. Berdasarkan rencana aksi, output sub kegiatan berada pada Triwulan II TA. 2022. Namun baru terealisasi pada triwulan IV dengan capaian 100%. Adapun Destana yang dibentuk yaitu Desa Batu Putih Kec. Burau, Desa Ujung Baru Kec. Tomoni, Desa Maliwowo Kec. Angkona dan Desa Ussu Kec. Malili.	Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 128.622.720,- dan realisasi keuangan Rp. 91.815.650,- atau sebesar 71,38 %. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena terdapat tahapan pada kegiatan Penilaian IKD yaitu Tahapan sosialisasi tidak dilakukan karena terkendala ketersediaan waktu narasumber, sehingga pelaksanaannya langsung pada penilaian IKD. Hal tersebut mempengaruhi realisasi keuangan	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Target output sub kegiatan pada triwulan IV yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%. Telah dilakukan rekonstruksi sektor permukiman terhadap korban kebakaran terdampak bencana sebanyak 18 Rumah dan Telah dilakukan rehabilitasi sektor permukiman terhadap korban terdampak bencana cuaca ekstrim sebanyak 43 Rumah.	Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 59.971.628,- yang terdiri dari belanja ATK Rp. 2.266.628, Belanja Perjalanan Dinas Rp. 55.160.000,- dan Belanja makan minum rapat Rp 1.645.000,- dan belanja penggandaan Rp. 900.000,- Realisasi 99,43% terdiri dari Belanja ATK Rp. 2.260.000,- , Belanja Perjalanan Dinas Rp. 54.847.724,-, Belanja penggandaan sebesar Rp. 899.700,-, dan makan minum tidak terealisasi karena anggaran disiapkan untuk kegiatan rapat koordinasi pascabencana dengan OPD terkait.	Proposal bantuan dana hibah pascabencana Tahun 2022 telah rampung dan menunggu verifikasi oleh BNPB
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target awal sebanyak 50 orang, dan pada saat perubahan anggaran dilakukan perubahan target menjadi 40 org dan realisasi 40 org (100%). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan I TA. 2022, namun baru terlaksana pada triwulan II, karena terkendala keterlambatan pengadaan perlengkapan untuk pelatihan.	Disediakan anggaran kas pada Triwulan II sebesar Rp. 64.014.850 dan realisasi keuangan Rp. 59.223.000,- (92,51%). Terdapat sisa anggaran sewa penginapan/hotel dan perjalanan dinas, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.	Agar PPTK mencermati realisasi belanja untuk dilakukan perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.

1	05	01	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, target penyelesaian dokumen renkon pada Triwulan III, namun terealisasi pada Desember 2022 yaitu tersusunnya dokumen Renkon Gempa, dengan persentase capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp. 191.799.980,- dan realisasi keuangan Rp. 136.031.150,- atau sebesar 70,92%. Realisasi kurang dari target karena pembayaran honor tenaga ahli untuk 5 org dan terealisasi hanya 4 org, sedangkan pada beberapa tahapan dalam penyusunan Renkon, narasumber yang hadir hanya 3 org, sehingga biaya transportasi dan sewa hotel disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org, terealisasi 262 org dengan persentase capaian kinerja 104,8%. Peserta gladi/apel siaga bencana yaitu TNI/POLRI, Satpol, Damkar, PT. Vale Indonesia Tbk (Fire), Senkom, Tagana, Bela Negara, PMI, SAR, Basamas, Dishub, Manggala Agni, TRC BPBD, Dinkes. Realisasi yang melebihi target karena pelaksanaan kegiatan dirangkaikan dengan gelar pasukan yang diadakan oleh TNI/POLRI secara serentak.	Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2022 kegiatan dilaksanakan pada Triwulan IV sebesar Rp. 32.379.970,- dan realisasi keuangan Rp. 32.233.200,- atau sebesar 99,55%	
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan januari s.d Desember 2022 (607 kejadian), semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.	Disediakan anggaran sampai triwulan IV sebesar Rp 665.091.800- Terealisasi sebesar Rp. 615.551.400,- atau sebesar 92.55%. Anggaran sub kegiatan Tidak terealisasi 100 % disebabkan jumlah personil TRC hingga saat ini berjumlah 24 orang dari estimasi anggaran yang disediakan untuk 25 orang. Hal tersebut mempengaruhi realisasi anggaran khususnya Belanja Makan minum aktivitas lapangan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Gaji upah Jasa)	PPTK segera merampungkan SPJ administrasi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, agar Laporan pertanggungjawaban tahun 2022 segera selesai dan lengkap. Dan kedepannya mencermati realisasi anggaran pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA.
1	05	01	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 Laki-laki dan 294 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 69.477.500,- dengan Realisasi sebesar Rp. 62.161.700,- atau 89,47%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp. 4.104.450,-. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana diakhir tahun.	PPTK segera merampungkan SPJ administrasi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, agar Laporan pertanggungjawaban tahun 2022 segera selesai dan lengkap. Dan kedepannya mencermati realisasi anggaran pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun

1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 Laki-laki dan 294 Perempuan) dan semuanya diberikan bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda).	Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 85.422.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.851.027,- atau 78,26 %. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena pada tahun 2022, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan, disamping itu terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang diantar langsung oleh Tim, sehingga terdapat efisiensi Belanja Bahan Pangan sebesar Rp.9.637.000,- dan Belanja Paket/Pengiriman Logistik sebesar Rp. 3.000.000,- serta Belanja Sewa Mobilitas Darat Rp 4.000.000,-.	PPTK segera merampungkan SPJ administrasi keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan, agar Laporan pertanggungjawaban tahun 2022 segera selesai dan lengkap. Dan kedepannya mencermati realisasi anggaran pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 40 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran sampai s.d triwulan IV sebesar Rp 29.254.820,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan IV hanya sebesar Rp. 700.000,-, hal ini disebabkan karena sampai akhir tahun 2022, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Namun anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana di akhir tahun.	Dan kedepannya mencermati realisasi anggaran pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) sebanyak 14 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD.	Dan disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 59.026.040,- dengan realisasi keuangan sebesar 17.267.400,- atau 38.79%, hal ini disebabkan karena sampai triwulan IV jumlah kejadian akibat Covid 19 mulai menurun dan bahkan pada bulan Mei dan Desember 2022 tidak terdapat kejadian bencana akibat Covid 19. Namun anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana covid yang tiba-tiba.	Dan kedepannya mencermati realisasi anggaran pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	01	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen (SOP) dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada Triwulan III sebesar Rp. 19.990.089,-, namun belum terealisasi, dan saat ini dalam proses konsultasi ke BPBD Provinsi terkait Perbup dan SOP Kebencanaan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi

## BAB 4

## PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD 2022 adalah sebesar Rp. 3.974.254.038,- (89,42%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.748.458.640,- (95,45%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.175.017.598,- (87,59%) dan Belanja Modal Rp 50.777.800,- (39,16%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2022 sebesar **100%** dengan ***predikat BAIK***.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2021 sebesar **112,11%**, dengan ***predikat BAIK***.
- d. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 92,16%
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%
- e. Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun Lalu adalah :
  - Target jangka menengah telah dimonitor pencapaiannya sesuai yang tertuang dalam Laporan Kinerja BPBD Tahun 2022 pada Tabel 11 hal. 28 (Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah), dan telah dimonitor setiap triwulan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Kinerja Triwulanan BPBD Tahun Anggaran 2022.
  - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan SK Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur Nomor 13.a Tahun 2022

tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

- Hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment
  - Rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi program/rencana aksi setiap triwulan telah ditindaklanjuti
  - Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan kinerja telah dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 1 tahun anggaran.
- f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2022 terhadap beberapa target sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
  - Terdapat beberapa jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
  - Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
  - Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
  - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana sehingga berdampak pada SILPA akhir tahun
  - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
  - Terdapat papan himbauan peringatan dini bencana yang rusak sehingga berdampak kepada capaian SPM Pelayanan informasi rawan bencana yang kurang dari 100%
  - Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.
- g. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD

- Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
- Pemasangan papan himbauan/peringatan dini bencana di beberapa titik rawan bencana
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program diakhir tahun
- Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 08 Februari 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**MASDIN AP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19730315 199311 1 001



---

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## Lampiran 1

**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
TAHUN ANGGARAN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.44	0.44	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2022 Rp **4,444,450,041**  
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Rp **3,974,254,038**



## Lampiran II

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN : 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.44	0.43	100

## LAMPIRAN III

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)  
TAHUN 2022  
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	Program	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan						% Capaian	Ket.	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				
	<b>PROGRAM UTAMA</b>									
1.	Program Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	72,518,925	71,572,000	98.69	
				Output	: Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0.09	0.09	100	
				Outcome	: Persentase warga negara di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.09	0.09	100	
		a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	72,518,925	71,572,000	98.69	

			Output	:	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	orang	262	262	100	
		2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	611,728,418	499,147,424	81.60
				Output	:	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	2.117	2.118	100.05
						Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	%	100	100	100
			Outcome	:	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	2.117	2.118	100.05	
		a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	76,939,270	69,001,000	89.68
				Output	:	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	orang	100	90	90

		b	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	58,000,000	52,836,000	91.10	
				Output	:	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	unit	47	47	100	
		c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	128,622,720	91,815,650	71.38	
				Output	:	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	orang	4	4	100	
		d	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	64,014,850	59,223,000	92.51	
				Output	:	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	orang	40	40	100	
		e	Penyusunan Rencana Kontijensi	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	191,799,980	136,031,150	70.92	
				Output	:	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	orang	1	1	100	
		f.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	59,971,628	58,007,424	96.72	

			Output	:	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	Dokumen	1	1	100	
					Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Dokumen	1	1	100	
		g .	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	32,379,970	32,233,200	99.55
				Output	:	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	orang	250	262	104.80
		2 .	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	908,272,910	762,531,527	83.95
				Output	:	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	%	100	100	100

			Outcome	:	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	
	a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	665,091,800	615,551,400	92.55	
			Output	:	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	%	100	100	100	
	b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	69,477,500	62,161,700	89.47	
			Output	:	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	
	c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	85,422,750	66,851,027	78.26	

			Output	:	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	%	100	100	100	
		d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	29,254,820	700,000	2.39
				Output	:	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100
		e	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	59,026,040	17,267,400	29.25
				Output	:	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	%	100	100	100
		4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	19,990,089	8,851,200	44.28

			Output	:	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	%	100	100	100	
			Outcome	:	Persentase penyusunan Perbup dan SOP kebencanaan	%	100	100	100	
		a	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	19,990,089	8,851,200	44.28
			Output	:	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	3	3	100	
	<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>									
<b>1.</b>	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	85,539,131	79,467,180	92.90

			Output	:	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	100	100	100		
			Outcome	:	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	%	100	100	100		
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	28,126,145	25,320,500	90.02	
				Output	:	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2	2	100	
		b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	4,785,466	4,253,000	88.87	
				Output	:	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	2	2	100	
		c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	4,365,240	4,099,400	93.91	Bag. Administrasi & Umum
				Output	:	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat waktu	Dokumen	2	2	100	

		d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	48,262,280	45,794,280	94.89	Bag. Administrasi & Umum
				Output	: Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	10	100	
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	1,842,286,343	1,760,304,440	95.55	
				Output	: Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	%	100	93.33	93.33	
				Outcome	: Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	%	100	100	100	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	1,794,519,521	1,712,858,640	95.45	
				Output	: Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	orang	15	13	86.67	
		b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	47,766,822	47,445,800	99.33	Bag. Administrasi & Umum

			eran SKPD	Output	:	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	18	18	100	
		3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	18,009,260	15,270,000	84.79	Bag. Administrasi & Umum
				Output	:	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	%	100	100	100	
				Outcome	:	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	%	100	100	100	
		a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	18,009,260	15,270,000	84.79	Bag. Administrasi & Umum
				Output	:	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Dokumen	4	4	100	
		4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	55,780,000	43,583,850	78.14	Bag. Administrasi & Umum

			Output	:	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100		
			Outcome	:	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	%	100	100	100		
		a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	55,780,000	43,583,850	78.14	
				Output	:	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	15	25	166.67	
		5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	512,468,850	501,758,205	97.91	
				Output	:	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100.4	100.40	
				Outcome	:	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	24,625,000	21,404,000	86.92	Bag. Administrasi & Umum

			Output	:	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jenis	8	8	100	
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	29,349,250	29,304,250	99.85	Bag. Administrasi & Umum
			Output	:	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	20	20	100	
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	20,625,000	14,221,000	68.95	Bag. Administrasi & Umum
			Output	:	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	100	
	d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	6,720,000	6,720,000	100	
			Output	:	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Exemplar	60	60	100	
	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	19,800,000	19,610,000	99.04	

			Output	:	Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	275	275	100	
		f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	411,349,600	410,498,955	99.79	
				Output	: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	orang	69	71	102.90	
		6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	112,168,000	35,404,300	31.56	
				Output	: Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	%	100	100	100	
				Outcome	: Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	
		a	Pengadaan Mebel	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	8,000,000	7,770,000	97.13	

			Output	:	Jumlah mebel yang diadakan	unit	4	4	100	
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	29,268,000	27,634,300	94.42	
			Output	:	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	unit	13	13	100	
	c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	74,900,000	-	-	
			Output	:	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	1	0	-	
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	67,948,115	62,872,844	92.53	
			Output	:	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	

			Outcome	:	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	
		a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	4,195,475	3,969,000	94.60	
				Output	: Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Surat	400	543	135.75	
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	43,952,640	40,703,844	92.61	
				Output	: Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Rekening	36	36	100	
		c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	19,800,000	18,200,000	91.92	
				Output	: Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	orang	2	2	100	
		8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	: Jumlah Dana	Rupiah	137,740,000	133,491,068	96.92	

			Output	:	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	
			Outcome	:	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang siap pakai	%	100	100	100	
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	94,050,000	93,966,068	99.91
				Output	:	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	13	12	92.31
		b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	23,690,000	23,505,000	99.22
				Output	:	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	35	52	148.57
		c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	:	Jumlah Dana	Rupiah	20,000,000	16,020,000	80.10



				Output	:	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	100	
--	--	--	--	--------	---	---	------	---	---	-----	--

